



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
BADAN PANGAN NASIONAL (BA.125)
TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**

BADAN PANGAN NASIONAL

Gedung E, Lantai 2
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar-Minggu
Jakarta Selatan – 12550



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pangan Nasional adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pangan Nasional. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepala Badan Pangan Nasional,



Arief Prasetyo Adi &
NIP 197411272022211004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Lampiran	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	VII
Pernyataan Tanggung Jawab	VIII
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60
VI. Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2.	Neraca
Lampiran 3.	Laporan Operasional
Lampiran 4.	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 5.	Neraca Percobaan Akrua
Lampiran 6.	Neraca Percobaan Kas
Lampiran 7.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran 8	LRA Belanja Menurut Akun
Lampiran 9	LRA Belanja Menurut Sumber Dana Jenis Belanja
Lampiran 10	LRA Belanja Menurut Sumber Dana Program Kegiatan
Lampiran 11	LRA Menurut Sumber Dana Kegiatan Output
Lampiran 12	LRA Pendapatan Menurut Akun

DAFTAR TABEL

Tabel A.2.1	Rincian Perbandingan Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan 2023	11
Tabel A.5.1	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Badan Pangan Nasional	14
Tabel A.5.2	Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel A.5.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel B.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel B.1.1	Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	20
Tabel B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	22
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	22
Tabel B.2.2	Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	23
Tabel B.3	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	24
Tabel B.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	25
Tabel B.4.1	Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	25
Tabel B.5	Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	26
Tabel B.5.1	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	26
Tabel B.5.2	Perbandingan Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel C.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	28
Tabel C.2	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel C.3	Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel C.3.1	Rincian Persediaan Per Satker Per 31 Desember 2023	30
Tabel C.4	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	30
Tabel C.5	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	31
Tabel C.5.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	31
Tabel C.5.2	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan	32
Tabel C.5.3	Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	32
Tabel C.6	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	33
Tabel C.6.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023	33

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

Tabel C.6.2	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan	34
Tabel C.6.3	Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	34
Tabel C.7	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
Tabel C.8	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	35
Tabel C.8.1	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023	36
Tabel C.8.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	36
Tabel C.8.3	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya	37
Tabel C.9	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	38
Tabel C.9.1	Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	38
Tabel C.9.2	Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan	38
Tabel C.10	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023	39
Tabel C.11	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	40
Tabel C.11.1	Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga	40
Tabel C.12	Perbandingan Rincian Utang yang belum ditagihkan	41
Tabel C.13	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	41
Tabel D	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023	42
Tabel D.1	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	42
Tabel D.2	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	43
Tabel D.2.1	Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023	44
Tabel D.3	Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	45
Tabel D.3.1	Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023	46
Tabel D.4	Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	47
Tabel D.4.1	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO per 31 Desember 2023	48
Tabel D.5	Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022	49
Tabel D.5.1	Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	50
Tabel D.6	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022	50
Tabel D.6.1	Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO per 31 Desember 2023	51
Tabel D.7	Perbandingan Beban Barang untuk Diserakan Kepada Masyarakat untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	53
Tabel D.7.1	Perbandingan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat di LO untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	53

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

Tabel D.8	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	54
Tabel D.9	Perbandingan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	55
Tabel E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	56
Tabel E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	57
Tabel E.3.3	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 30 September 2022	57
Tabel E.3.4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	57
Tabel E.4	Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.2	Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023	22
------------	---	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pangan Nasional selaku UAPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2024

Kepala Badan Pangan Nasional,



Arief Prasetyo Adi
Arief Prasetyo Adi
NIP 197411272022211004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahunan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp203.306.887 atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 443.158.920.771 atau mencapai 95,35% dari alokasi anggaran sebesar Rp 464.776.703.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 60.145.110.119, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 216.069.000; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 56.000.180.733; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 3.928.860.386.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.444.930.000 dan Rp 58.700.180.119.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.387.120, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 415.732.479.495 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp 415.730.092.375. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp200.919.767, sedangkan Beban dari Kegiatan Non Operasional Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 415.529.172.608.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp415.529.172.608 ditambah Transaksi antar Entitas sebesar Rp474.229.352.727 terjadi kenaikan Ekuitas sebesar Rp 58.700.180.119 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 58.700.180.119.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% THD ANGGARAN	31-Des-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		0	203.306.887	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0
3. Pendapatan BLU		0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0	203.306.887	0	0
III. Pendapatan Hibah		0		0	0
JUMLAH PENDAPATAN (A.I + A. II + A.III)		0	203.306.887	0	0
B. Belanja Negara					0
I. Belanja Pemerintah Pusat		464.776.703.000	443.158.920.771	95	0
1. Belanja Pegawai		48.477.233.000	39.396.856.890	81	0
2. Belanja Barang		381.825.248.000	369.340.151.731	97	0
3. Belanja Modal		34.474.222.000	34.421.912.150	99	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang		0	0	0	0
5. Belanja Subsidi		0	0	0	0
6. Belanja Hibah		0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

8. Belanja Lain-Lain		0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa		0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah		0	0	0	0
a. Dana Perimbangan		0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum		0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum		0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus		0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah		0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY		0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0
2. Dana Desa		0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah		0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		464.776.703.000	443.158.920.771	95,35	0
C. Pembiayaan					0

II. NERACA

BADAN PANGAN NASIONAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	%
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	156.330.000	0	156.330.000	0
Persediaan	59.739.000	0	59.739.000	0
JUMLAH ASET LANCAR	216.069.000	0	216.069.000	0
ASET TETAP				0
Peralatan dan Mesin	99.306.608.593	0	99.306.608.593	0
Gedung dan Bangunan	261.660.000	0	261.660.000	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	(43.568.087.860)	0	(43.568.087.860)	0
JUMLAH ASET TETAP	56.000.180.733	0	56.000.180.733	0
ASET LAINNYA				0
Aset Tak Berwujud	4.120.040.050	0	4.120.040.050	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1.288.600.000	0	1.288.600.000	0
Aset Lain-lain	2.306.977.584	0	2.306.977.584	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3.786.757.248)	0	(3.786.757.248)	0
JUMLAH ASET LAINNYA	3.928.860.386	0	3.928.860.386	0
JUMLAH ASET	60.145.110.119	0	60.145.110.119	0

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	%
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.444.930.000	0	1.444.930.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.444.930.000	0	1.444.930.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN	1.444.930.000	0	1.444.930.000	0
EKUITAS				0
EKUITAS				0
Ekuitas	58.700.180.119	0	58.700.180.119	0
JUMLAH EKUITAS	58.700.180.119	0	58.700.180.119	0
JUMLAH EKUITAS	58.700.180.119	0	58.700.180.119	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	60.145.110.119	0	60.145.110.119	0

III. LAPORAN OPERASIONAL**BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022****(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.387.120	-
UMLAH PENDAPATAN		2.387.120	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	39.396.856.890	-
Beban Persediaan	D.3	9.019.350.186	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	137.089.275.997	-
Beban Pemeliharaan	D.5	4.376.468.499	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	183.133.709.779	-
Beban Bantuan Sosial	D.7	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	35.156.873.890	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	7.559.944.254	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			-
JUMLAH BEBAN		415.732.479.495	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(415.730.092.375)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	200.919.767	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	200.919.767	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		200.919.767	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(415.529.172.608)	
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(415.529.172.608)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PANGAN NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(415.529.172.608)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITA	E.3	-	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	-	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	-	0
Lain-lain	E.3.5	-	0
Jumlah		-	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	474.229.352.727	0
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		58.700.180.119	0
EKUITAS AKHIR	E.5	58.700.180.119	0

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pangan Nasional

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamankan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Badan Pangan Nasional berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”* Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Badan Pangan Nasional mengemban misi sebagai berikut :

- Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.
- Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
- Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
- Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
- Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
- Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
- Memperkuat sistem logistik pangan.
- Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi.

- Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal.
- Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
- Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Pangan Nasional.

Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahunan Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Badan Pangan Nasional termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Badan Pangan Nasional seperti Satuan Kerja Dekon yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan satuan kerja Badan Pangan Nasional melalui aplikasi MONSAKTI per tanggal 31 Desember 2023.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara, pengumpulan data melalui pengunduhan dari Aplikasi MONSAKTI. Pada penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahunan Tahun 2023 ini diunduh berdasarkan Aplikasi SAKTI tanggal 31 Desember 2023.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN senilai Rp103.552.000.000. Selama periode berjalan dan sesuai dengan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Pangan Nasional TA. 2023 (Revisi ke-6). Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan Stabilisasi dan Harga Pangan, Kerawanan Pangan dan Gizi, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta dukungan manajemen lainnya

sehingga dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 jumlah pagu anggaran yang tercatat senilai Rp464.776.703.000. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi yang tercatat Laporan Keuangan (SAKTI) pada Tahunan Tahun 2023 pada Tabel A.2.1.

Tabel A.2.1 Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

JENIS BELANJA	NILAI PAGU AWAL	REVISI PAGU	SELISIH
Belanja Pegawai	20.096.821.000	48.477.233.000	28.380.412.000
Belanja Barang	223.486.185.000	381.825.248.000	158.339.063.000
Belanja Modal	2.642.500.000	34.474.222.000	31.831.722.000
JUMLAH	246.225.506.000	464.776.703.000	218.551.197.000

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pangan Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pangan Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel A.5.1 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Badan Pangan Nasional

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 4) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No : S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526121)

Belanja Alsin Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526122)

Belanja Gedung & Bangunan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526123)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jringan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam

bentuk uang (526124)

Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang (526312)

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel A.5.2. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Badan Pangan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai berikut :

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
Jenis dan Nilai BMN		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatanganan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatanganan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.5.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp203.306.887 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
PNBP	0	203.306.887	0
Jumlah	0	203.306.887	0

Berdasarkan Tabel B.1.1 terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan pendapatan pada tahun 2023 yang tertera pada tabel B.1.2.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel B.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	200.919.767	0	100
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	251.200	0	100
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.135.920	0	100
Total	203.306.887	0	100

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 sebesar Rp203.306.887 berasal dari:

1. Pendapatan paling besar berasal dari Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Setoran LUEP) sebesar Rp200.919.767.
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kegiatan paket meeting) sebesar Rp251.200.
3. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp2.135.920 yang merupakan pengembalian sisa TUP Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya untuk membayar pajak kegiatan yang menggunakan anggaran TUP.

Tidak terdapat selisih antara Realisasi pendapatan menurut data SAKTI dan data di bendahara penerimaan.

Rincian pendapatan Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Setoran LUEP) sebagai berikut:

KODE AKUN	KODE PERIODE	NOMOR DOKUMEN	KODE BILLING	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
425912	14/3/2023 15:16	1107A1JNFLIKN9TD	820230314338221	4.545.454	Angsuran a.n Jack Tampi, Penanggung Jawab LUEP UD Karya Sulut
425912	15/3/2023 08:38	02E6F3CIFANDGN8J	820230314319123	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV Mustika an Hadin Azhari Kab OKI Sumsel
425912	31/3/2023 08:54	72A872G4VG5GUOF4	820230330933732	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV Mustika an Hadin Azhari Kab OKI Sumsel
425912	31/3/2023 15:45	A7FAB2G4VG5H53NG	820230331141872	23.646.409	Pengembalian LUEP Karya Tani an Sajali Kab. Rokan Hilir Propinsi Riau
425912	03/04/2023 11:56	CBAE161QUQH7IUOC	820230403291916	2.272.727	Angsuran a.n Jack Tampi, Penanggung Jawab LUEP UD Karya Sulut
425912	04/05/2023 08:58	CA3D548VV5FEQ0SK	820230503990164	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV. Mustika an Hadin Azhari Kab. OKI Sumsel
425912	26/05/2023 11.44	5E5BD7QLUFPM4N56	820230526753958	1	Pembulatan HPP Crash Program Karya Tani an Sajali Kab Rokan Hilir Prov Riau
425912	27/06/2023 10:32	CA3717QLUFSFHLSN	820230620501911	20.298.373	Pembayaran Angsuran LUEP KUD. Sangkan Jaya Kab. Sumedang Jabar
425912	22/06/2023 09:28	F831E7QLUFSGK2QU	820230621629278	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV Mustika an Hadin Azhari Kab. OKI Sumsel
425912	26/06/2023 13:02	2D32B0N9VR9EF512	820230622778402	452.045	Pembayaran HPP Debitur LUEP M. Rum Massau Sulsel
425912	05/07/2023 12:02	9CDDC2G4VGGLOA06	820230705063942	77.939.531	HPP LUEP KP BINA UTAMA/DARMI H SAMAN (2017.01.008) (25/05) Aceh
425912	26/07/2023 08:30	8BA027QLUFVJI9JS	820230725379708	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV Mustika an Hadin Azhari Kab. OKI Sumsel
425912	08/09/2023 08:30	4C8B97QLUG517BD6	820230907473318	909.091	Pembayaran Angsuran LUEP CV Mustika an Hadin Azhari Kab. OKI Sumsel
425912	19/12/2023 09:30	40BAF7QLUGEB2J7S	820231219793148	9.090.909	Angsuran a.n Jack Tampi, Penanggung Jawab LUEP UD Karya Sulut
425912	21/12/2023 12:39	141F73CIFBIE9R2V	820231221111903	1.818.182	Pembayaran Angsuran LUEP KP Gle Keuminyan/Iriana Aceh
425912	15/12/2023 14.46	7A5331JNFMG3GLS	820231215465148	24.012.045	Pembayaran Tunggalan DPM LUEP 2004 an CV Sri Anugerah/Toko Taufik Kab. Majalengka
425912	20/12/2023 10.06	4C1D81JNFMDEV7Q1	820231214276417	31.389.545	HPP Debitur LUEP M RUM MASSAU dan HPP Pelunasan CP Debitur H. MUHAMMAD JAFAR
425912	14/3/2023 15:16	1107A1JNFLIKN9TD	820230314338221	4.545.454	Angsuran a.n Jack Tampi, Penanggung Jawab LUEP UD Karya Sulut
TOTAL				200.919.767	

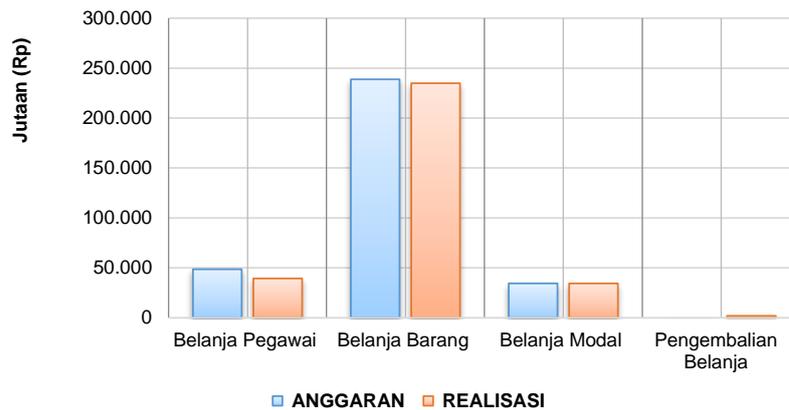
A.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp443.158.920.771 atau 95,35% dari anggaran belanja sebesar Rp464.776.703.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2023				% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja Pegawai	48.477.233.000	39.403.139.620	6.282.730	39.396.856.890	81,27
Belanja Barang	381.825.248.000	371.329.637.767	1.989.486.036	369.340.151.731	96,73
Belanja Modal	34.474.222.000	34.421.912.150	0	34.421.912.150	99,85
Jumlah Belanja	464.776.703.000	445.154.689.537	1.995.768.766	443.158.920.771	95,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar B.2



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk 31 Desember 2023 ditunjukkan pada Tabel B.2.1.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2023				% Real Anggaran
	Anggaran	Realisasi bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	119.481.984.000	109.750.831.539	771.198.682	108.979.632.857	91,21
6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	139.426.877.000	135.213.740.922	449.616.998	134.764.123.924	96,65
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	109.132.947.000	106.265.660.230	688.132.482	105.577.527.748	96,74
6877 Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	96.734.895.000	93.924.456.846	86.820.604	93.837.636.242	97,00
Total	464.776.703.000	445.154.689.537	1.995.768.766	443.158.920.771	95,35

Tabel rincian Realisasi per jenis belanja berdasarkan kegiatan disajikan pada **Lampiran B.1.**

Dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2022 sebesar Rp0 maka realisasi belanja 31 Desember 2023 sebesar Rp443.158.920.771 mengalami peningkatan sebesar Rp443.158.920.771 atau 100%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Percepatan kegiatan di setiap unit kerja yang menangani pangan baik di pusat maupun provinsi/kabupaten/kota.
2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah dimulai dari triwulan I.
3. Intensitas pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional yang tinggi.
4. Terdapat pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung stabilisasi harga pangan.
5. Terdapat pengadaan dalam rangka mendukung satu data pangan pada Pusat Data dan Informasi.
6. Terbentuknya satker dekonsentrasi pada pertengahan tahun 2023.
7. Pelaksanaan rapat koordinasi yang mengundang *stake holder* yang menangani pangan baik di pusat dan di daerah.

Tabel B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi Netto	Anggaran 2022	Realisasi Netto	Naik (Turun)
		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Pegawai	48.477.233.000	39.396.856.890	0	0	39.396.856.890
Belanja Barang	381.825.248.000	369.340.151.731	0	0	369.340.151.731
Belanja Modal	34.474.222.000	34.421.912.150	0	0	34.421.912.150
Jumlah	464.776.703.000	443.158.920.771	0	0	443.158.920.771

A.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.396.856.890 dan Rp0. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp39.396.856.890 atau 100% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya penambahan pagu belanja pegawai Badan Pangan Nasional.
2. Adanya penambahan pegawai (PPPK) pada Badan Pangan Nasional.
3. Adanya kenaikan pangkat, jenjang, jabatan, dan golongan.

Jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3**

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	31 Desember 2023		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	16.165.079.314	1.406.000	16.163.673.314	0	16.163.673.314
Belanja Gaji & Tunjangan PPPK	1.295.377.157	421.800	1.294.955.357	0	1.294.955.357
Belanja Tunj. Khusus & Bel. Pegawai Transito	21.942.683.149	4.454.930	21.938.228.219	0	21.938.228.219
Jumlah	39.403.139.620	6.282.730	39.396.856.890	0	39.396.856.890

A.4. BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp369.340.151.731 dan Rp0. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp369.340.151.731 atau 100% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Percepatan kegiatan di setiap unit kerja yang menangani pangan baik di pusat maupun provinsi/kabupaten/kota.
2. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah dimulai dari triwulan I.
3. Intensitas pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional yang tinggi.
4. Terbentuknya satker dekonsentrasi pada pertengahan tahun 2023.
5. Pelaksanaan rapat koordinasi yang mengundang *stake holder* yang menangani pangan baik di pusat dan di daerah.

Tabel B.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	9.322.961.000	9.045.703.744	97,03
Belanja Barang Non Operasional	107.741.179.000	105.231.644.668	97,67
Belanja Barang Persediaan	9.776.441.000	9.380.833.186	95,95
Belanja Jasa	24.511.729.000	23.385.061.965	95,40
Belanja Pemeliharaan	4.447.790.000	4.374.674.499	98,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	185.745.829.000	178.624.313.208	96,17
Belanja Perjalanan - Luar Negeri	5.017.319.000	4.523.396.571	90,16
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	35.262.000.000	34.774.523.890	98,62
Jumlah	381.825.248.000	369.340.151.731	96,73

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2023 per mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.4.1.

Tabel B.4.1 Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Belanja Barang	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Naik (Turun) (%)
	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Netto (Rp)	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Netto (Rp)	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
Belanja Barang Operasional	9,056,337,244	10,633,500	9.045.703.744	0	0	0	100
Belanja Barang Non Operasional	105,273,544,968	41,900,300	105.231.644.668	0	0	0	100
Belanja Barang Persediaan	9,380,833,186	0	9.380.833.186	0	0	0	100
Belanja Jasa	23,402,998,758	17,936,793	23.385.061.965	0	0	0	100
Belanja Pemeliharaan	4.374.674.499	0	4.374.674.499	0	0	0	100
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	180,059,504,939	1,435,191,731	178.624.313.208	0	0	0	100
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5,007,220,283	483,823,712	4.523.396.571	0	0	0	100
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	34.774.523.890	0	34.774.523.890	0	0	0	100
Jumlah	371,329,637,767	1,989,486,036	369.340.151.731	0	0	0	100

A.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.421.912.150 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp34.421.912.150 atau 100% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Tabel B.5. Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	31 Desember 2023		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.049.548.850	0	30.049.548.850	0	30.049.548.850
Belanja Modal Lainnya	2.410.363.300	0	2.410.363.300	0	2.410.363.300
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.962.000.000	0	1.962.000.000	0	1.962.000.000
Jumlah	34.421.912.150	0	34.421.912.150	0	34.421.912.150

A.6. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.049.548.850 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 100%. Belanja modal peralatan dan mesin pada Badan Pangan Nasional berasal dari: kendaraan Roda Empat Minibus, kendaraan bermotor khusus lainnya, alat pengering (*driyer*), laptop, AC Split, drone, meja kerja stainless, *sound sistem*, dispenser, alat pendingin (*cold storage*), *scanner*.

Tabel B.5.1. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Des 2023	REALISASI 31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.049.548.850	0	100
Jumlah Belanja	30.049.548.850	0	100

A.7. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.410.363.300 atau 100% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini dipengaruhi oleh adanya belanja soft wear pada Badan Pangan Nasional.

Tabel B.5.2. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	2.410.363.300	0	100
Jumlah Belanja	2.410.363.300	0	100

A.8. BELANJA PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP LAINNYA DAN/ATAU ASET LAINNYA

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.962.000.000 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 100%. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya berasal dari belanja ruang kendali IT pada Pusat Data dan Informasi Pangan.

Tabel B.5.2. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.962.000.000	0	100
Jumlah Belanja	1.962.000.000	0	100

A. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

A.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel C.1. Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	0	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran UP dengan rincian terlampir. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP rincian terlampir.

A.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp156.330.000 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari Satker 690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, uang tersebut merupakan LS Bendahara yang masuk ke rekening Bendahara setelah tanggal 31 Desember 2023 (2 Januari 2024). Uang tersebut berdasarkan informasi dari Bendahara Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sudah dibayarkan kepada pihak ketiga (honor output kegiatan, honorarium narasumber, perjalanan dinas, dan transport lokal,). Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:

Tabel C.2. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya dan Setara Kas	156.330.000	0	156.330.000	100
Jumlah	156.330.000	0	156.330.000	100

A.3 PIUTANG DARI KUN

Nilai Piutang dari KUN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp0 dan Rp0. Piutang dari KUN adalah akun yang digunakan dalam proses alokasi anggaran belanja satker berupa piutang dari tambahan uang persediaan yang akan diterima yang berasal dari SPM TUP. Per 31 Desember 2023 seluruh satker Badan Pangan Nasional tidak ada Piutang dari KUN.

A.4 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp 59.739.000 dan Rp0.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian Jenis Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel C.3 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Barang Konsumsi	59.739.000	0	59.739.000	100
Jumlah	59.739.000	0	59.739.000	100

**Tabel C.3.1 Rincian Persediaan Per Satker
Per 31 Desember 2023**

Kode Satker	Akun	Uraian	Nilai
690590	117111	Badan Pangan Nasional Pusat	59.300.000
690705	117111	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	439.000
		Jumlah	59.739.000

Nilai persediaan pada Satker Badan Pangan Nasional Pusat merupakan Usulan Jurnal Koreksi (UJK) dari BPK RI atas hasil pemeriksaan KHP Tahap 1 berasal dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa *Formaldehyde test kit* sebanyak 7 paket dengan nilai Rp30.800.000 dan *Pestisida test kit* sebanyak 5 paket dengan nilai Rp28.500.000 pada Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan.

Nilai Rp439.000 merupakan sisa persediaan berupa ATK pada Satker Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Badan Pangan Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing senilai Rp56.000.180.733 dan Rp 0. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

**Tabel C.4 Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	99.306.608.593	0	99.306.608.593	100
2	Gedung dan Bangunan	261.660.000	0	261.660.000	100
3	Akumulasi Penyusutan	(43.568.087.860)	0	(43.568.087.860)	100
	Jumlah	56.000.180.733	0	56.000.180.733	100

Jumlah Aset Tetap Badan Pangan Nasional sebesar Rp56.000.180.733 tercatat di Satker Pusat Badan Pangan Nasional namun keberadaannya ada beberapa di 34 satker dekonsentrasi.

C. 4 TANAH

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Badan Pangan Nasional tidak mempunyai aset tanah.

C.5 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing masing senilai Rp99.306.608.593 dan Rp0 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel C.5 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Peralatan dan Mesin	0	99.988.275.367	681.666.774	99.306.608.593

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel C.5.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Pembelian	32.082.848.850
Perolehan lainnya	3.500.000
Transfer Masuk Likuidasi dari satker BKP Kementan	67.901.926.517
Total Mutasi Tambah	99.988.275.367
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	678.166.774
Koreksi nilai	3.500.000
Total Mutasi Kurang	681.666.774

1. Pembelian berasal dari pengadaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 DIPA Badan Pangan Nasional senilai Rp32.082.848.850.
2. Perolehan lainnya berasal dari koreksi nilai pengadaan 2 unit dispenser yang semula tercatat modul aset tetap 1 unit senilai Rp7.000.000 menjadi Rp3.500.000.
3. Transfer masuk berasal dari aset BKP Kementan sesuai BAST No 2158/PL.330/A/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 senilai Rp 67.901.926.517.
4. Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke persediaan berupa 4 unit mesin proses lainnya (3 unit mesin sosoh dan 1 unit mesin

penepung sorgum) sebesar Rp142.500.000 pada kegiatan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Alat mesin sosoh dan penepung sorgum tersebut berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp 535.666.774 sebagai tindak lanjut Konsep Hasil Pemeriksaan Tahap 2 poin 13 BPK RI dengan surat penyampaian nomor 13/S/LK-BA125/04/2024 tanggal 22 April 2024 atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional tahun 2023 Unaudited.
6. Mutasi kurang yang berasal dari koreksi nilai 1 unit dispenser senilai Rp7.000.000 diubah menjadi Rp3.500.000

Tabel C.5.2 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	99.988.275.367
Mutasi Kurang	681.666.774
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2023	99.306.608.593
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(43.529.967.228)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2023	55.776.641.365

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 :

Tabel C.5.3. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Belanja Aset Peralatan dan Mesin :	
Belanja Peralatan dan Mesin	30.049.548.850
Mutasi :	
Pembelian	32.082.848.850
Pengembangan langsung	-
Total Mutasi Aset	32.086.348.850
Selisih	(2.033.300.000)
Penjelasan Selisih :	
Ketidaksesuaian Akun	(1.962.000.000)
Reklasifikasi Masuk	71.200.000
Reklasifikasi Keluar	(142.500.000)

Belanja Modal Peralatan dan mesin menurut LRA sebesar Rp30.049.548.850. Sedangkan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.082.848.850 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.033.300.000 yang berasal dari:

- Ketidaksesuaian akun sebesar Rp1.962.000.000 disebabkan karena salah kodesifikasi seharusnya menggunakan akun belanja 532111 tetapi pada POK menggunakan akun 536111 atas pengadaan ruang kendali IT pada Pusat Data dan Informasi Pangan.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp71.200.000 berupa kursi besi metal yang sebelumnya tercatat sebagai kursi roda.
- Reklasifikasi aset ke persediaan sebesar Rp142.500.000 berupa 4 unit mesin proses lainnya (mesin sosok) pada kegiatan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

C.6 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp261.660.000 dan Rp0. Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Tabel C.6 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023**

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	0	261.660.000	0	261.660.000

Gedung dan Bangunan senilai Rp261.660.000 berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara berasal dari transfer masuk satker BKP Kementan. Terdiri dari bangunan Gudang tertutup permanen senilai Rp43.646.000 dan bangunan industri senilai Rp58.195.000 terletak di Maluku Utara selanjutnya terletak di Sulawesi Tengah berupa bangunan Gudang terbuka permanen senilai Rp81.462.000 dan bangunan lainnya senilai Rp78.357.000.

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel C.6.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	261.660.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0
Total Mutasi Kurang	0

Adapun nilai saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel C.6.2. Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	261.660.000
Mutasi Kurang	0
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2023	261.660.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(38.120.632)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2023	223.539.368

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.

Tabel C.6.3. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Gedung dan Bangunan Modul GLP	261.660.000
Pencatatan Gedung dan Bangunan Modul Aset	261.660.000
Selisih	-
Pencatatan Modul Aset dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	
Total Belanja Gedung dan Bangunan	0
Hibah (Masuk)	
Pembelian	0
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Perolehan/Penambahan KDP	
Total Pencatatan Gedung dan Bangunan	0
Selisih	0

Belanja Gedung dan Bangunan menurut LRA sebesar Rp0, menurut data di Modul GLP-Modul Aset sebesar Rp 0, sehingga tidak terdapat selisih.

C.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Pangan Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing masing senilai Rp43.568.087.860 dan Rp0.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel C.7 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	99.306.608.593	(43.529.967.228)	55.776.641.365
3	Gedung dan Bangunan	261.660.000	(38.120.632)	223.539.368
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		99.568.268.593	(43.568.087.860)	56.000.180.733

ASET LAINNYA**C.8 ASET TAK BERWUJUD**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp4.120.040.050 dan Rp0. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Hak Cipta	0	0	0	0
2	Paten	0	0	0	0
3	Software	4.120.040.050	0	4.120.040.050	100
4	Lisensi	0	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		4.120.040.050	0	4.120.040.050	100

Rincian mutasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.8.1. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Aset Tidak Berwujud	0	4.220.025.050	99.985.000	4.120.040.050

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.8.2. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	4.220.025.050
Pembelian	2.510.348.300
Transfer Masuk	1.709.676.750
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi kurang:	99.985.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	99.985.000
Saldo per 31 Desember 2023	4.120.040.050
Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	(1.479.779.664)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.640.260.386

Mutasi Tambah dari pembelian berasal dari pengadaan tahun anggaran 2023 DIPA Badan Pangan Nasional senilai Rp2.510.348.300 dan Transfer masuk senilai Rp1.709.676.750 berasal dari transfer masuk satker BKP Kementan sesuai BAST No 2158/PL.330/A/06/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Mutasi kurang berasal dari koreksi nilai akibat Void BAST (Pembatalan BAST pada modul aset tetap dan SPM) senilai Rp 99.985.000.

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8.3 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Aset Tak Berwujud Modul GLP	4.120.040.050
Pencatatan Aset Tak Berwujud Modul Aset	4.120.040.050
Selisih	-
Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Lainnya	
Belanja modal lainnya	0
Mutasi :	
Pembelian	2.510.348.300
Transfer Masuk Likuidasi	1.709.676.750
Koreksi Aset Tak Berwujud Lainnya	0
Total Mutasi Aset	4.120.040.050
Selisih	0

C.9 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp1.288.600.000 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya pada rekening penampungan dana titipan, rekening penampungan dana jaminan, atau rekening penampungan sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) Tahun 2023 yang berasal dari 2 SPM yakni SPM nomor 4452A senilai Rp390.400.000 berdasarkan Kontrak Nomor 14/SPK/PPK-NFA/C/IX/2023 untuk penyusunan database dan SPM nomor 4436A senilai Rp898.200.000 berdasarkan Kontrak Nomor 460/SPK/PPK-KSP/BPN-B.1/12/2023 untuk Belanja Jasa Lainnya dalam rangka Penyiapan Instrumen Survei.

C.10 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp2.306.977.584 dan Rp0. Aset Lain -lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pangan Nasional sertadalam proses penghapusan dari BMN

Rincian mutasi Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel C.9. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	0	2.306.977.584	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel C.9.1. Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	535.666.774
Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
Transfer Masuk Likuidasi	1.771.310.810
Total Mutasi Tambah	2.306.977.584
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Total Mutasi Kurang	0

Adapun nilai saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel C.9.2. Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	2.306.977.584
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	2.306.977.584
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	2.306.977.584
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

C.11 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Badan Pangan Nasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp3.786.757.248 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.10 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	4.120.040.050	(1.479.779.664)	2.640.260.386
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Jumlah	4.120.040.050	(1.479.779.664)	2.640.260.386
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.306.977.584	(2.306.977.584)	0
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
	Jumlah	2.306.977.584	(2.306.977.584)	0
	Total	6.427.017.634	(3.786.757.248)	2.640.260.386

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.444.930.000 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pangan Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada di bawah ini.

Tabel C.11 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.444.930.000	0	1.444.930.000	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0	0
Uang Muka Dari KPPN	0	0	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	1.444.930.000	0	1.444.930.000	0

C.12 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.444.930.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel C.11.1. Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga

NO	Eselon I	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Pangan Nasional Pusat	1.288.600.000	0	1.288.600.000	0
2	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	156.330.000	0	156.330.000	0
Jumlah		1.444.930.000	0	1.444.930.000	0

Penjelasan rincian utang kepada pihak ketiga sebagai berikut :

Utang kepada pihak ketiga senilai Rp1.288.600.000 berasal dari transaksi RPATA yang terdiri dari 2 SPM yakni SPM nomor 4452A senilai Rp390.400.000 berdasarkan Kontrak Nomor 14/SPK/PPK-NFA/C/IX/2023 untuk penyusunan database dan SPM nomor 4436A senilai Rp898.200.000 berdasarkan Kontrak Nomor 460/SPK/PPK-KSP/BPN-B.1/12/2023 untuk Belanja Jasa Lainnya dalam rangka Penyiapan Instrumen Survei.

Utang kepada pihak ketiga senilai Rp156.330.000 berasal dari Satker 690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, uang tersebut merupakan LS Bendahara yang masuk ke rekening Bendahara setelah tanggal 31 Desember 2023 (2 Januari 2024). Uang tersebut berdasarkan informasi dari Bendahara Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sudah dibayarkan kepada pihak ketiga.

C.13 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST.

Tabel C.12. Perbandingan Rincian Utang yang belum ditagihkan

NO	Eselon I	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Badan Pangan Nasional Pusat	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0

C.14 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.15 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Berikut rincian Utang Pajak Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 per satker:

Tabel C.13. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	Uraian	Nilai
1	Badan Pangan Nasional Pusat	0
	Jumlah	0

EKUITAS

C.16 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp58.700.180.119 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO sebagai berikut:

Tabel D. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023

URAIAN	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.387.120	2.387.120	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
TOTAL	2.387.120	2.387.120	0

Tidak ada selisih antara Pendapatan Negara Bukan Pajak menurut LRA dan Pendapatan Negara Bukan Pajak menurut LO.

C.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.387.120 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.135.920	0	100
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	251.200	0	100
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Total	2.387.120	0	100

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.387.120, berikut rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
690699	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	2.135.920,00
690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	251.200,00
	JUMLAH	2.387.120

Pendapatan Rp2.135.920 merupakan pajak UP/TUP yang harus disetor sampai 31 Desember 2023 namun baru disetor Januari 2024 terdapat pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Rp251.200 merupakan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

C.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.396.856.890 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel D.2. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	10.987.063.480	0	100
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	149,952	0	100
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	739,688,862	0	100
Beban Tunj. Anak PNS	201,325,218	0	100
Beban Tunj. Struktural PNS	900,620,000	0	100
Pengembalian Beban Tunj Struktural PNS	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,693,778,000	0	100
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	107,068,972	0	100
Beban Tunj. Beras PNS	546,698,580	0	100
Beban Uang Makan PNS	805,995,250	0	100
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	181,285,000	0	100
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	983,398,800	0	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	27,676	0	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,703,680	0	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	6,704,452	0	100
Beban Tunjangan Struktural PPPK	77,000,000	0	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	38,092,920	0	100

Beban Uang Makan PPPK	159,027,829	0	100
Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	0	100
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	20,064,451,266	0	100
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,873,776,953	0	100
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	0	100
Jumlah	39,396,856,890	0	100

Berdasarkan tabel di atas Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 100 % bila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan Satker Badan Pangan Nasional baru mendapatkan alokasi anggaran (BA 125) pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 masih menggunakan DIPA BKP Kementerian Pertanian.

Tabel D.2.1 Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Gaji Pokok PNS	10.987.063.480	0	10.987.063.480
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	149.952	0	149.952
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	739.688.862	0	739.688.862
Beban Tunj. Anak PNS	201.325.218	0	201.325.218
Beban Tunj. Struktural PNS	900.620.000	0	900.620.000
Pengembalian Beban Tunj Struktural PNS	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.693.778.000	0	1.693.778.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	107.068.972	0	107.068.972
Beban Tunj. Beras PNS	546.698.580	0	546.698.580
Beban Uang Makan PNS	807.401.250	(1.406.000)	805.995.250
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	(1.406.000)	1.406.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	181.285.000	0	181.285.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	983.398.800	0	983.398.800
Beban Pembulatan Gaji PPPK	27.676	0	27.676
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	30.703.680	0	30.703.680
Beban Tunjangan Anak PPPK	6.704.452	0	6.704.452

Beban Tunjangan Struktural PPPK	77.000.000	0	77.000.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	38.092.920	0	38.092.920
Beban Uang Makan PPPK	159.449.629	(421.800)	159.027.829
Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	(421.800)	421.800	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	20.068.906.196	(4.454.930)	20.064.451.266
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	(4.454.930)	4.454.930	0
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.873.776.953	0	1.873.776.953
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	0	0
Jumlah	39.396.856.890	0	39.396.856.890

Tidak ada penyesuaian pada Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO pada Satker Pusat Badan Pangan Nasional.

C.3 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp9.019.350.186 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.3. Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(dalam Rupiah)
			NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	8.976.127.186	0	100
Beban Persediaan Bahan Baku	43.175.000	0	100
Beban Persediaan Lainnya	48.000	0	100
Jumlah Beban Persediaan	9.019.350.186	0	100

Tabel D.3.1. Perbandingan Belanja Persediaan di LRA dan Beban Persediaan di LO per 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Persediaan konsumsi	9.380.833.186	(404.706.000)	8.976.127.186
Beban Persediaan Bahan Baku	0	43.175.000	43.175.000
Beban Persediaan Lainnya	0	48.000	48.000
Jumlah	9.380.833.186	(361.483.000)	9.019.350.186

Terdapat penyesuaian antara Belanja Persediaan pada LRA dan Beban Persediaan pada LO per 31 Desember 2023 yang berasal dari :

- Kesalahan input kodifikasi barang pada modul komitmen pada persediaan konsumsi sebesar Rp404.706.000 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Satker	URAIAN	Nilai
690590	Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	382.350.000
690590	Beban Persediaan Bahan Baku	43.175.000
690590	Beban Persediaan Konsumsi atas Temuan BPK RI berupa tumbler	(23.100.000)
690700	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	514.000
690702	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.000.000
690704	Beban Persediaan Lainnya	48.000
690705	Persediaan	439.000
690709	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	212.000
690711	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23.000
690731	Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	45.000
Jumlah		404.706.000

- Kesalahan kodifikasi barang pada modul komitmen Satker Pusat sebesar Rp43.175.000, yang seharusnya dicatat sebagai Barang yang diserahkan kepada Masyarakat.
- Kesalahan kodifikasi barang pada modul komitmen Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Aceh sebesar Rp48.000, yang seharusnya dicatat sebagai Persediaan Barang Konsumsi.

C.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp137.089.275.997 dan Rp0. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.4. Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	6.958.345.524	0	100
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143.446.449	0	100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.820.383.500	0	100
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	123.528.271	0	100
Beban Bahan	32.321.761.964	0	100
Pengembalian Beban Bahan	0	0	0
Beban Honor Output Kegiatan	20.191.201.500	0	100
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	52.074.346.824	0	100
Pengembalian belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	100
Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	29.907.879	0	100
Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	1.136.026.245	0	100
Beban Sewa	4.512.613.679	0	100
Beban Jasa Profesi	7.810.809.412	0	100
Beban Jasa Lainnya	9.895.704.750	0	100
Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	0	100
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	71.200.000	0	0
Jumlah	137,089,275,997	0	100

Tabel D.4.1 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO per 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.968.146.524	(9.801.000)	6.958.345.524
521111	Pengembalian Belanja Keperluan Kantor	(9.801.000)	9.801.000	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143.446.449	0	143.446.449
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.821.216.000	(832.500)	1.820.383.500
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(832.500)	832.500	0
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	123.528.271	0	123.528.271
521211	Beban Bahan	32.322.438.582	(676.618)	32.321.761.964
521211	Pengembalian Beban Bahan	(676.618)	676.618	0
521213	Beban Honor Output Kegiatan	20.221.670.000	(30.468.500)	20.191.201.500
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(30.468.500)	30.468.500	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	52.729.436.386	(655.089.562)	52.074.346.824
521219	Pengembalian belanja Barang Non Operasional Lainnya	(10.755.182)	10.755.182	0
522112	Beban Langganan Telepon	29.907.879	0	29.907.879
522131	Beban Jasa Konsultan	1.136.026.245	0	1.136.026.245
522141	Beban Sewa	4.512.613.679	0	4.512.613.679
522151	Beban Jasa Profesi	7.819.389.412	(8.580.000)	7.810.809.412
522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	(8.580.000)	8.580.000	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	9.905.061.543	(9.356.793)	9.895.704.750
522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	(9.356.793)	9.356.793	0
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	71.200.000	71.200.000
Jumlah		137,662,410,377	(573,134,380)	137,089,275,997

Realisasi Belanja barang dan jasa terdapat penyesuaian menurut LRA dan LO sebesar Rp(573.134.380) berasal dari :

- Pengembalian Belanja keperluan perkantoran sebesar Rp9.801.000 oleh satker pusat (690590)
- Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp832.500 oleh satker pusat (690590)

- Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp676.618 oleh satker pusat (690590), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (690703), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (690720)
- Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp30.468.500 oleh satker pusat (690590), Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (690710), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat (690730)
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp8.580.000 oleh satker pusat (690590), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (690721)
- Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp9.356.793 oleh satker pusat (690590)
- Penyesuaian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp655.089.562 terdiri dari :
 - a. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp10.755.182
 - b. Pembayaran tunggakan pada Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun (GPM) Tahun 2022 sebesar Rp585.034.380
 - c. Berdasarkan temuan BPK Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.300.000 masih tersisa sampai 31 Desember 2023, maka dimasukkan dalam UJK dari Akun Belanja 521219 ke Akun 117111.
- Beban Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp71.200.000 belanja pengadaan 80 unit kursi roda yang seharusnya dicatat sebagai kursi besi/metal, sudah dilakukan reklasifikasi terhadap kursi roda menjadi kursi besi/metal.

C.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.376.468.499 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.5 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.196.201.592	0	100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.178.472.907	0	100

Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	1.794.000	0	100
Total	4.376.468.499	0	100

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.196.201.592	0	1.196.201.592
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.178.472.907	0	3.178.472.907
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	1.794.000	1.794.000
Total	4.374.674.499	1.794.000	4.376.468.499

Realisasi Belanja Pemeliharaan terdapat penyesuaian menurut LRA dan LO sebesar Rp1.794.000 disebabkan karena kesalahan kodifikasi barang pada modul komitmen dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (690700) sebesar Rp514.000.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY (690702) sebesar Rp1.000.000.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (690709) sebesar Rp212.000.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (690711) sebesar Rp23.000.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp45.000.

C.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp183.133.709.779 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	91.712.453.359	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.692.350.958	0	100

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.912.455.206	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.293.053.685	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	100
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	852.142.626	0	100
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	3.671.253.945	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	100
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	183.133.709.779	0	100

Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
Beban Perjalanan Biasa	92.457.771.707	(745.318.348)	91.712.453.359
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(751.441.148)	751.441.148	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.982.999.328	(290.648.370)	10.692.350.958
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(277.718.370)	277.718.370	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.892.547.872	19.907.334	9.912.455.206
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(11.934.666)	11.934.666	0
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.726.186.032	(433.132.347)	66.293.053.685
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(394.097.547)	394.097.547	0
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	856.489.861	(4.347.235)	852.142.626
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(4.347.235)	4.347.235	
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.150.730.422	(479.476.477)	3.671.253.945
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	(479.476.477)	479.476.477	0
Total	183.147.709.779	(14.000.000)	183.133.709.779

Terdapat penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas pada LRA dan Beban Perjalanan Dinas pada

LO Tahun 2023 sebesar Rp(14.000.000) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp745.318.348 yang seharusnya Rp751.441.148, terdapat kurang bayar sebesar **Rp6.122.800** yang berasal dari kesalahan pembebanan akun pengembalian perjalanan dinas pada Satker berikut :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp12.930.000, yang dibebankan pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota yang seharusnya pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas biasa.
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebesar Rp100.000, yang seharusnya dibebankan pada akun pengembalian belanja paket meeting luar kota.
 - c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp6.707.200, yang seharusnya dibebankan pada akun pengembalian belanja paket meeting luar kota.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp290.648.370 yang seharusnya Rp277.718.370, terdapat lebih bayar sebesar **Rp(12.930.000)** yang berasal dari kesalahan pembebanan akun pengembalian perjalanan dinas pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, yang seharusnya dibebankan pada belanja pengembalian perjalanan dinas biasa.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp19.907.334 yang seharusnya Rp(11.934.666), terdapat kurang bayar sebesar **Rp31.842.000** berasal dari kesalahan pembebanan akun pada akun pengembalian perjalanan dinas paket meeting luar kota pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Aceh.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp433.132.347 yang seharusnya Rp394.097.547, terdapat lebih bayar sebesar **Rp(39.034.800)**, yang berasal dari kesalahan pembebanan akun pengembalian perjalanan dinas pada Satker berikut :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Aceh sebesar Rp31.842.500 yang seharusnya dibebankan pada akun pengembalian perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp(6.707.200) yang dibebankan pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas biasa, seharusnya dibebankan pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
 - c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebesar Rp(100.000) yang dibebankan pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas biasa, seharusnya dibebankan pada akun pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
 - d. Pembayaran tunggakan Belanja Paket Meeting Luar Kota Kegiatan Stabilisasi

Pasokan Harga Pangan Tahun 2022 pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp14.000.000

C.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.156.873.890 dan Rp0. Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial .

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	5.250.000.000	0	100
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	29.524.523.890	0	100
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	382.350.000		
Total	35.156.873.890	0	100

Tabel D.7.1 Perbandingan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat di LRA dan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat di LO untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	5.250.000.000	0	5.250.000.000
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	29.524.523.890	0	29.524.523.890
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	382.350.000	382.350.000
Total	34.774.523.890	382.350.000	35.156.873.890

Realisasi Belanja Pemeliharaan terdapat penyesuaian menurut LRA dan LO sebesar Rp382.350.000 disebabkan karena Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi masuk ke Pembebanannya ke Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.

C.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.559.944.254 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan/peningkatan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.081.042.389	0	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.239.701		
Jumlah Penyusutan	7.084.282.090	0	100
Beban Amortisasi Software	475.662.164	0	100
Jumlah Amortisasi	475.662.164	0	100
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.559.944.254	0	100

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi menurut LRA sebesar Rp0 sedangkan menurut LO sebesar Rp7.559.944.254. Tidak ada penyesuaian antara Realisasi Belanja Penyusutan dan Amortisasi menurut LRA dan Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut LO.

C.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

adalah sebesar Rp200.919.767 dan Rp0.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel D.9 Perbandingan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 23	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.919.767	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	200.919.767	0	0

- **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp200.919.767 terdiri atas akun sebagai berikut :

AKUN	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	200.919.767
	Total	200.919.767

KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
690590	Badan Pangan Nasional	145.518.177
690700	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	24.012.045
690717	Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan	31.389.545
	JUMLAH	200.919.767

Realisasi pendapatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu menurut LRA sebesar Rp200.919.767 sedangkan menurut LO sebesar Rp200.919.767.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp415.529.172.608 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Tidak ada koreksi nilai Persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Atas Reklasifikasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
	0	0	0

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL atas aset-aset pada Badan Pangan Nasional.

Tabel E.3.3 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0
	0	0	0

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Aset Non Reval	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp474.229.352.727 dan Rp0. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	443.158.920.771	0
313121	Diterima dari Entitas Lain	(203.306.887)	0
313211	Transfer Keluar	0	0
313221	Transfer Masuk	31.273.738.843	0
391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	0
JUMLAH		474.229.352.727	0

Transfer masuk berasal dari aset BKP Kementan sesuai BAST No: 2158/PL.330/A/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 senilai Rp 67.901.926.517.

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp(203.306.887) dan Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp443.158.920.771 dan Rp0.

E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.273.738.843 berasal dari satker BKP Kementan (018.11.452332) dan Transfer Keluar sampai dengan

tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 58.700.180.119 dan Rp0.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Satker Badan Pangan Nasional (Pasal 45).

Perlengkapan, pendanaan dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dialihkan menjadi perlengkapan, pendanaan dan dokumen Badan Pangan Nasional (Pasal 46 ayat 2).

Pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pendanaan dan dokumen peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara. (Pasal 46 ayat 3).

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90) sepanjang yang mengatur Badan Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 50).

Berkaitan dengan hal di atas, sampai dengan saat ini tindaklanjut proses pengalihan pendanaan, pegawai, perlengkapan, aset dan dokumen serta pengalihan objek lain yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional masih dalam proses pembahasan, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementan, DPR, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan.

Badan Ketahanan Pangan sudah melakukan inventarisasi atas asset-aset maupun pegawai yang dimiliki, atas hasil inventarisasi asetnya saat ini dalam proses penyelesaian penghapusan untuk asset-aset yang memenuhi unsur penghapusan.

Perkembangan proses likuidasi BKP ke Badan Pangan Nasional :

1. Sudah dibentuk tim likuidasi satker lingkup Badan Ketahanan Pangan;
2. Sudah dilakukan inventarisasi aset satker lingkup Badan Ketahanan Pangan;
3. Untuk tahun anggaran 2022, hanya ada 1 satker yaitu Badan Ketahanan Pangan Pusat

kode satker 018.11.452332, sementara utk satker DK sejumlah 34 satker tdk mendapatkan DIPA lagi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa seluruh aset Badan Ketahanan Pangan akan dialihkan ke Badan Pangan Nasional pada tahun 2022.

Pada Tahun 2021 sudah dilakukan likuidasi seluruh aset dari satker Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) ke Kantor Pusat Badan Ketahanan Pangan.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat transaksi RPATA yang berasal dari 2 SPM yakni SPM nomor 4452A senilai Rp.390.400.000 berdasarkan Kontrak Nomor 14/SPK/PPK-NFA/C/IX/2023 untuk penyusunan database dan SPM nomor 4436A senilai Rp.898.200.000 berdasarkan Kontrak Nomor 460/SPK/PPK-KSP/BPN-B.1/12/2023 untuk Belanja Jasa Lainnya dalam rangka Penyiapan Instrumen Survei.

Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 melaksanakan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam dalam rangka mendukung pengentasan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden yang disampaikan dalam Rapat Internal pada tanggal 2 Maret 2023 (Tahap 1: Bulan April-Juni) serta arahan pada Rapat Internal pada tanggal 10 Juli 2023 (Tahap II: Bulan September-November). Jumlah penerima bantuan pangan daging ayam dan telur Tahun 2023 adalah 1.446.089 Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Masing-masing KRS menerima 1 ekor daging ayam beku dan 1 pack (10 butir) telur ayam setiap bulannya.

Penyaluran CPP Tahun 2023 juga dilaksanakan untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras. Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras merupakan kegiatan direktif yang dilaksanakan atas arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Rapat Internal pada tanggal 2 Maret 2023. Bantuan Pangan Beras dilaksanakan dalam 2 Tahap. Anggaran Bantuan Pangan Beras Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp7.759.306.912.205,00 telah dibayarkan melalui Satker Direktorat DCP BA BUN pada tanggal 29 Desember 2023. Sementara untuk Bantuan Pangan Beras Tahap 2 Tahun 2023 saat ini masih dalam tahap reviu oleh BPKP. Penyaluran Beras SPHP Tahun 2023 dilaksanakan Bulan Januari-Desember 2023. Pada Triwulan 1-3 telah tersalur 797.355.006,78 kg beras SPHP dengan nilai Rp2.014.260.480.803,56 dan telah dibayarkan melalui Satker Direktorat DCP BA BUN pada tanggal 29 Desember 2023. Untuk penyaluran SPHP Tw 4, hingga akhir Desember 2023 belum dilaksanakan review.

Review atas pelaksanaan penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur telah dilaksanakan untuk penyaluran tahap 1. Berdasarkan LHR BPKP Nomor PE.12.03/LHP-274/D102/1/2023 tanggal 20 Desember 2023, rekomendasi yang dapat dibayarkan untuk penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahap 1 Tahun 2023 sebesar Rp365.673.617.873,00 dan telah dibayarkan pada tanggal 19 Februari 2024. Sementara untuk review penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Tahap 2 Tahun 2023 saat ini masih dalam tahap review oleh BPKP. Secara lebih lengkap, pelaksanaan penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur Tahun 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan Ayam Telur Tahap I 2023

Kegiatan penyaluran CPP untuk bantuan pangan daging ayam dan telur Tahun 2023 merupakan kegiatan direktif berdasarkan Arahan Presiden RI tentang penyaluran bantuan pangan yang disampaikan pada Rapat Internal pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Internal No. R-30/Seskab/DKK/03/2023.

Selanjutnya dalam Risalah Rakortas Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian RI tentang Pembahasan Kebijakan Harga Beras dan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pupuk 14 Maret 2023 (Risalah Rakortas No. Rakortas-7/14.03.2023-25), disebutkan bahwa data penerima bantuan pangan sejumlah 1.446.089 Keluarga Beresiko Stunting (KRS) bersumber dari BKKBN. Permohonan Data KRS untuk Bantuan Pangan ke BKKBN 13 Maret 2023 disampaikan melalui Surat Deputi No. 358/TS.03.03/B/03/2023. Kemudian Penyampaian Data KRS dari BKKBN pada tanggal 15 Maret 2023 disampaikan melalui Surat Deputi BKKBN No. 588/LP.02/G4/2023 dan BAST Data KRS antara BKKBN dengan Bapanas 15 Maret 2023 BAST No. 586/LP.02/G4/2023.

Terkait dengan penyediaan anggaran untuk penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahun 2023, Deputi I bersurat melalui surat Nomor 381/TS.03.02/B/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 mengusulkan pendanaan penyaluran CPP untuk bantuan pangan Tahap I Tahun 2023 dan Surat Nomor 396/TS.03.03/B/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Permohonan Penyediaan Anggaran untuk Bantuan Pangan. Usulan anggaran berdasarkan pada usulan Perum BULOG dan BUMN Pangan/IDFOOD, belum mengacu kepada hasil reuiu BPKP.

Anggaran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahun 2023 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Ekontim DJA Kemenkeu, mekanisme penyediaan anggaran pada BA 125 Bapanas yang dilakukan dengan mekanisme pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan berdasarkan hasil reuiu BPKP. Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Pembahasan Mekanisme Pendanaan Dalam Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan tanggal 5 April 2023.

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk usulan penggunaan anggaran yaitu hasil revidi dari BPKP. Dalam hal revidi bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap I Tahun 2023, LHR dari BPKP terbit pada tanggal 20 Desember 2023 Nomor PE.12.03/LHP-274/D102/1/2023 yang disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nomor: PE.12.03/SP-64/D1/02/2023 tentang Hasil Revidi Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I Tahun 2023 pada Badan Pangan Nasional. Dalam LHR disebutkan bahwa jumlah yang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan pembayaran adalah sebesar Rp365.673.617.873,00.

Menindaklanjuti hasil review BPKP, Kepala Bapanas menyampaikan Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Menteri Keuangan Nomor 403/TS.03.03/K/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Tambahan Anggaran Badan Pangan Nasional TA 2023 untuk pembayaran bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap I Tahun 2023. Namun karena keterbatasan waktu penyediaan anggaran, permohonan tambahan anggaran untuk pembayaran bantuan pangan Daging Ayam dan Telur tahap I Tahun 2023 kembali diusulkan pada Tahun 2024. Kepala Badan Pangan Nasional kembali menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Nomor 03/TS.03.03/K/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Usulan Anggaran Pembayaran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I 2023. Nilai yang diajukan sebesar Rp365.673.617.873,00 sesuai LHR BPKP.

Menteri Keuangan bersurat kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas melalui surat Nomor S-23/MK.2/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Badan Pangan Nasional (BA 125) untuk Pembayaran Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I TA 2023 menyampaikan anggaran sebesar Rp365.673.618.000,00 untuk pembayaran bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahap I 2023 kepada ID Food.

Pembayaran terhadap bantuan pangan daging ayam dan telur ayam Tahap I 2023 sebesar Rp365.673.617.873,00 dibayarkan pada 19 Februari 2024 dengan nomor SP2D 241391303002852.

2. Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap II Tahun 2023:

Kegiatan penyaluran CPP untuk bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023 merupakan kegiatan direktif berdasarkan Arahan Presiden RI tentang penyaluran bantuan pangan yang disampaikan pada Rapat Internal pada tanggal 10 Juli 2023

sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Internal No. R-76.1/Seskab/DKK/07/2023. Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan Tahap II Tahun 2023 pada bulan Oktober-Desember.

BUMN Pangan/ID Food melalui surat Direktur Utama Nomor 7/SPMH/PU.02.02/RNI.01/IX/2023 pada tanggal 1 September 2023 mengajukan permohonan pemberian penugasan bantuan pangan untuk penanganan stunting Tahap ke-2. Penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023 diputuskan pemerintah dilaksanakan lebih awal, yakni bulan September-November 2023. Hal ini langsung disampaikan oleh Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0441/Seskab/Ekon/09/2023 tanggal 2 September 2023.

Dengan adanya arahan percepatan penyaluran bantuan pangan, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan data KRS calon penerima bantuan pangan daging ayam dan telur ayam. Penerima bantuan pangan dalam rangka penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan Tahap Kedua Tahun 2023 ditetapkan melalui Kepbadan Nomor 351.3/TS.03.03/K/9/2023. Badan Pangan Nasional melalui surat Kepala Badan Nomor 209/TS.03.03/K/9/2023 tanggal 4 September 2023 mengusulkan kepada Menteri BUMN penugasan BUMN Pangan untuk penyaluran bantuan pangan.

Seperti pelaksanaan Tahap I, penyaluran bantuan pangan melibatkan pemerintah daerah. Melalui surat Kepala Badan Nomor 210.1/TS.03.03/K/9/2023 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota memberitahukan penyaluran CPP dalam rangka pemberian bantuan pangan pengentasan stunting. Badan Pangan Nasional meminta kepala daerah untuk menugaskan Kepala Dinas urusan Pangan dan Kepala Dinas urusan Keluarga Berencana membantu pelaksanaan penyaluran bantuan pangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung teknis pelaksanaan kegiatan, Badan Pangan Nasional menerbitkan regulasi pendukung diantaranya Penetapan Jenis Pangan, Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan tahap kedua tahun 2023, petunjuk teknis penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan tahap kedua tahun 2023. Pada 10 September 2023, dilaksanakan sosialisasi kepada Dinas urusan Pangan di 7 provinsi. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui undangan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Nomor 337/TS.03.03/B.3/09/2023

Pada 11 September 2023 penugasan BUMN Pangan untuk penyaluran CPP untuk bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023 telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN yang tertuang pada surat Nomor SR-457/MBU/09/2023. Data KRS untuk penerima bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023

diberikan BKKBN pada 12 September 2023 melalui surat Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik Nomor 1892/LP.02/G4/2023. Data BNBA diberikan sebanyak 1.446.089 KRS yang tersebar di 7 provinsi, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Barat.

Terkait dengan pendanaan, Badan Pangan Nasional telah mengusulkan pendanaan penyaluran CPP untuk bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023 melalui surat Deputi Nomor 942/TS.03.03/B/09/2023 tanggal 18 September 2023. Selain itu permohonan penyediaan anggaran penyaluran bantuan pangan Tahap Kedua Tahun 2023 ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Kepala Badan Nomor 302/TS.03.03/K/10/2023.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan daging ayam dan telur Tahap II Tahun 2023 selesai dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember 2023. Setelahnya, melalui surat Deputi Nomor 02/TS.03.03/B/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, Bapanas meminta reviu atas pelaksanaan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Stunting Tahap II Tahun 2023 kepada BPKP. Nilai utang kepada pihak ketiga atas penyaluran CPP belum didapatkan karena masih menunggu hasil reviu dari BPKP.

Pada Tahun 2023, Badan Pangan juga telah melaksanakan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden yang disampaikan pada Rapat Internal pada tanggal 2 Maret 2023. Bantuan Pangan berupa beras diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per KPM per bulan (selama periode penyaluran). Jumlah penerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 21.353.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) KPM. Data KPM bersumber dari Kementerian Sosial. Penyaluran dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Tahap 1 (Mar-Mei) dan Tahap 2 (Sep-Nov) serta perpanjangan Tahap 2 pada Bulan Desember.

Penyediaan dan pembayaran penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2023 dilaksanakan melalui Satker Direktorat DCP BA BUN (999801). Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap 1 Tahun 2023 dilakukan pembayarannya pada tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp7.759.306.912.205,00 yang mengacu kepada LHR BPKP Nomor PE.12.03/LHR-268/D102/1/2023 tanggal 20 Desember 2023. Sementara untuk penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap 2 Tahun 2023 masih dalam tahapan pelaksanaan reviu oleh BPKP.

Penyaluran CPP Tahun 2023 juga dilaksanakan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pelaksanaan SPHP bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi

terkendali di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran CPP untuk SPHP dilakukan baik di pasar tradisional terutama pasar-pasar pencatatan Badan Pusat Statistik, toko modern/swalayan, dan lokasi lain yang mudah dijangkau konsumen/ masyarakat.

Penyediaan dan pembayaran SPHP Beras Tahun 2023 dilaksanakan melalui Satker Direktorat DCP BA BUN (999801). Berdasarkan hasil rewiu APIP Bapanas, penyaluran SPHP Beras Tw 1-3 Tahun 2023 sebesar 797.355.006,78 kg dengan nilai Rp2.014.260.480.803,56 dan dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2023. Untuk penyaluran SPHP Tw 4, hingga akhir Desember 2023 belum dilaksanakan review. Berdasarkan laporan dari Perum BULOG, realisasi penyaluran SPHP Tw 4 sebesar 399.373.020,85 kg dengan nilai Rp580.922.702.575,80. Nilai ini telah dicatat dalam Laporan Keuangan Satker Direktorat Dstribusi dan Cadangan Pangan BA BUN dan akan dibayarkan oleh Badan Pangan Nasional setelah dilakukan Berita Acara Serah Terima kepada KPA Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-13/PB/PB.6/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal Perkembangan Hasil Reviu BPKP atas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023. Dalam rangka menindaklanjuti konsep temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 bersama ini kami sampaikan :

1. BPK RI telah menyampaikan konsep temuan atas LKPP tahun 2023 kepada pemerintah dimana salah satunya adalah temuan terkait pencatatan nilai utang kepada pihak ketiga atas penyaluran CPP tahun 2023.
2. Dalam rangka nilai utang kepada pihak ketiga atas penyaluran CPP yang andal diperlukan nilai berdasarkan reviu BPKP.
3. Kemudian sesuai dengan hasil pembahasan dengan pemeriksa BPK, utang kepada pihak ketiga yang berdasar pada CPP bantuan beras disajikan pada LKBUN Audited tahun 2023. Sementara utang kepada pihak ketiga atas penyaluran CPP daging ayam dan telur disajikan pada LK Bapanas Audited tahun 2023.
4. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada LKBUN masih kurang catat untuk daging ayam dan telur sebesar Rp759.174.680.019,00. Atas nilai Rp759.174.680.019,00 Badan Pangan Nasional hanya mengungkapkan utang kepada pihak ketiga pada Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca, tidak masuk dalam Usulan Jurnal Koreksi (UJK) untuk dimasukkan pada Neraca.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Sudah dilakukan Likuidasi Satker Badan Ketahanan Pangan (018.11.452332) per periode 30 September 2023.
2. Terdapat transfer masuk Aset dari Satker Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional. Sesuai BAST nomor 2158/PL.330/A/06/2023 tanggal 26 Juni 2023.
 - a. Persediaan senilai Rp.23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
 - b. Peralatan dan Mesin (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) senilai Rp.67.938.673.567,00 (enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - c. Gedung dan Bangunan senilai Rp.261.660.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. Aset Tak Berwujud (Software) senilai Rp.1.709.676.750,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- e. Aset Lain-lain (gabungan intrakomptabel dan ektrakomptabel) senilai Rp.1.771.694.810,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

3. Program Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan Pangan Nasional terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 1 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Kegiatan Perizinan Produk, Pengawasan dan Pengendalian Produk, Data dan Informasi Publik, yang tersebar di 34 Provinsi dengan pagu mencapai Rp 35.295.921.000 dan realisasi sebesar Rp34.956.082.377 (99,04%) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BA	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	BADAN PANGAN NASIONAL	6.849.000.000	6.833.854.595	99,78%	4	4	100,00%	Telah tersedia Data dan Informasi Ketersediaan Pangan
2	BADAN PANGAN NASIONAL	8.650.400.000	8.650.250.000	100,00%	3	3	100,00%	Telah tersedia Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3	BADAN PANGAN NASIONAL	6.831.564.000	6.361.859.650	93,12%	36	43	120,00%	Telah tersedia Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan
4	BADAN PANGAN NASIONAL	6.583.827.000	6.237.087.685	94,73%	36	39	108,61%	Telah tersedia Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan
5	BADAN PANGAN NASIONAL	6.517.080.000	6.101.073.505	93,62%	549	566	103,10%	Telah tersedia Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
6	BADAN PANGAN NASIONAL	4.939.500.000	4.929.362.988	99,79%	36	36	100,00%	Telah tersedia Data Situasi Konsumsi Pangan
7	BADAN PANGAN NASIONAL	16.550.400.000	14.723.971.826	88,96%	4265	4507	105,67%	Telah tersertifikasi sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar
8	BADAN PANGAN NASIONAL	12.020.568.000	11.221.883.706	93,36%	235	238	101,24%	Tersedianya Laporan Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan

F.2.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Terdapat Konsep Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahap I, Tahap II, dan Tahap III.

F.2.2. MONITORING PINJAMAN DAN HIBAH

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat dana hibah dan pinjaman luar negeri pada Satker Badan Pangan Nasional.

F.2.3. MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat satker inaktif lingkup Satker Badan Pangan Nasional.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL 125

Tgl Data : 16/05/24 12:33 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:29 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	464,776,703,000	443,158,920,771	(21,617,782,229)	95	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak 16/05/24 4:29 PM

Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	156,330,000	0	156,330,000	0.00
Persediaan	59,739,000	0	59,739,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	216,069,000	0	216,069,000	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	99,306,608,593	0	99,306,608,593	0.00
Gedung dan Bangunan	261,660,000	0	261,660,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(43,568,087,860)	0	(43,568,087,860)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	56,000,180,733	0	56,000,180,733	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,120,040,050	0	4,120,040,050	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,288,600,000	0	1,288,600,000	0.00
Aset Lain-lain	2,306,977,584	0	2,306,977,584	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,786,757,248)	0	(3,786,757,248)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	3,928,860,386	0	3,928,860,386	
JUMLAH ASET	60,145,110,119	0	60,145,110,119	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,444,930,000	0	1,444,930,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,444,930,000	0	1,444,930,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	1,444,930,000	0	1,444,930,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	58,700,180,119	0	58,700,180,119	0.00
JUMLAH EKUITAS	58,700,180,119	0	58,700,180,119	
JUMLAH EKUITAS	58,700,180,119	0	58,700,180,119	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	60,145,110,119	0	60,145,110,119	

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:29 PM

Halaman : 1

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,387,120	0	2,387,120	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,387,120	0	2,387,120	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,387,120	0	2,387,120	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	39,396,856,890	0	39,396,856,890	
Beban Persediaan	9,019,350,186	0	9,019,350,186	
Beban Barang dan Jasa	137,089,275,997	0	137,089,275,997	
Beban Pemeliharaan	4,376,468,499	0	4,376,468,499	
Beban Perjalanan Dinas	183,133,709,779	0	183,133,709,779	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	35,156,873,890	0	35,156,873,890	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:29 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,559,944,254	0	7,559,944,254	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	415,732,479,495	0	415,732,479,495	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(415,730,092,375)	0	(415,730,092,375)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200,919,767	0	200,919,767	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200,919,767	0	200,919,767	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	200,919,767	0	200,919,767	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(415,529,172,608)	0	(415,529,172,608)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(415,529,172,608)	0	(415,529,172,608)	()

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(415,529,172,608)	0	(415,529,172,608)	()
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	474,229,352,727	0	474,229,352,727	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	58,700,180,119	0	58,700,180,119	
EKUITAS AKHIR	58,700,180,119	0	58,700,180,119	

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	156,330,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	59,739,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	99,306,608,593	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	261,660,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	43,529,967,228
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	38,120,632
0.0	162151	Software	4,120,040,050	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,288,600,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	2,306,977,584	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	2,306,977,584
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,479,779,664
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,444,930,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	443,158,920,771
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	203,306,887	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	31,273,738,843
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	251,200
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	200,919,767
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,135,920
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,987,063,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	149,952	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	739,688,862	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	201,325,218	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	900,620,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,693,778,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	107,068,972	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	546,698,580	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	805,995,250	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	181,285,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	983,398,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	27,676	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,703,680	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,704,452	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	77,000,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	38,092,920	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	159,027,829	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	20,064,451,266	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,873,776,953	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,958,345,524	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143,446,449	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,820,383,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	123,528,271	0
3.0	521211	Beban Bahan	32,321,761,964	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	20,191,201,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	52,074,346,824	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	29,907,879	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,136,026,245	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,512,613,679	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,810,809,412	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	9,895,704,750	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,196,201,592	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,178,472,907	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	91,712,453,359	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,692,350,958	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,912,455,206	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66,293,053,685	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	852,142,626	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	3,671,253,945	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	5,250,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,081,042,389	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,239,701	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	475,662,164	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,976,127,186	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,794,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	382,350,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	29,524,523,890	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	43,175,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	48,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	71,200,000	0
JUMLAH			523,435,741,609	523,435,741,609

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	443,158,920,771
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	203,306,887	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	251,200
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	200,919,767
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,135,920
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,987,063,480	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	149,952	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	739,688,862	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	201,325,218	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	900,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,693,778,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	107,068,972	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	546,698,580	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	1,406,000
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	807,401,250	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	181,285,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	983,398,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27,676	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,703,680	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,704,452	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	77,000,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38,092,920	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	421,800
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	159,449,629	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	20,068,906,196	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	4,454,930
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,873,776,953	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,801,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,968,146,524	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	143,446,449	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,821,216,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	832,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	123,528,271	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	676,618
3.0	521211	Belanja Bahan	32,322,438,582	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,221,670,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	30,468,500
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	10,755,182

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (125) BADAN PANGAN NASIONAL

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 16/05/24 4:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,729,436,386	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,380,833,186	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	29,907,879	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,136,026,245	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,512,613,679	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,819,389,412	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	8,580,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	9,905,061,543	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	9,356,793
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,196,201,592	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,178,472,907	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	751,441,148
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92,457,771,707	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,982,999,328	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	277,718,370
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	11,934,666
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,892,547,872	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66,726,186,032	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	394,097,547
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	4,347,235
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	856,489,861	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	479,476,477
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	4,150,730,422	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	29,524,523,890	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	5,250,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,049,548,850	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	2,410,363,300	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	1,962,000,000	0
JUMLAH			445,357,996,424	445,357,996,424

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,910,970,000	12,780,623,000	10,987,063,480	0	10,987,063,480	85.97	1,793,559,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	126,000	1,703,000	149,952	0	149,952	8.81	1,553,048
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	788,186,000	1,109,706,000	739,688,862	0	739,688,862	66.66	370,017,138
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	229,880,000	335,409,000	201,325,218	0	201,325,218	60.02	134,083,782
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	550,620,000	1,271,650,000	900,620,000	0	900,620,000	70.82	371,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,751,582,000	1,961,634,000	1,693,778,000	0	1,693,778,000	86.35	267,856,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,238,000	142,179,000	107,068,972	0	107,068,972	75.31	35,110,028
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	577,912,000	764,539,000	546,698,580	0	546,698,580	71.51	217,840,420
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,188,296,000	892,376,000	807,401,250	1,406,000	805,995,250	90.48	86,380,750
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	165,270,000	266,945,000	181,285,000	0	181,285,000	67.91	85,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	17,268,080,000	19,526,764,000	16,165,079,314	1,406,000	16,163,673,314	82.78	3,363,090,686
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	347,104,000	1,724,864,000	983,398,800	0	983,398,800	57.01	741,465,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	104,000	27,676	0	27,676	26.61	76,324
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,709,000	98,488,000	30,703,680	0	30,703,680	31.18	67,784,320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,882,000	37,332,000	6,704,452	0	6,704,452	17.96	30,627,548
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	462,000,000	103,500,000	77,000,000	0	77,000,000	74.4	26,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,332,000	62,266,000	38,092,920	0	38,092,920	61.18	24,173,080
511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,824,000	174,060,000	159,449,629	421,800	159,027,829	91.61	15,032,171
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	892,854,000	2,200,614,000	1,295,377,157	421,800	1,294,955,357	58.86	905,658,643
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,935,887,000	21,163,543,000	20,068,906,196	4,454,930	20,064,451,266	94.83	1,099,091,734
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	5,586,312,000	1,873,776,953	0	1,873,776,953	33.54	3,712,535,047
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,935,887,000	26,749,855,000	21,942,683,149	4,454,930	21,938,228,219	82.03	4,811,626,781
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	20,096,821,000	48,477,233,000	39,403,139,620	6,282,730	39,396,856,890	81.28	9,080,376,110
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,583,729,000	7,090,350,000	6,968,146,524	9,801,000	6,958,345,524	98.28	132,004,476
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345,840,000	251,335,000	143,446,449	0	143,446,449	57.07	107,888,551
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,771,560,000	1,852,126,000	1,821,216,000	832,500	1,820,383,500	98.33	31,742,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,240,000	129,150,000	123,528,271	0	123,528,271	95.65	5,621,729
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	412,438,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,184,807,000	9,322,961,000	9,056,337,244	10,633,500	9,045,703,744	97.14	277,257,256

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:31 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	25,343,875,000	34,201,214,000	32,322,438,582	676,618	32,321,761,964	94.51	1,879,452,036
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,485,850,000	20,533,420,000	20,221,670,000	30,468,500	20,191,201,500	98.48	342,218,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,856,840,000	53,006,545,000	52,729,436,386	10,755,182	52,718,681,204	99.48	287,863,796
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	57,686,565,000	107,741,179,000	105,273,544,968	41,900,300	105,231,644,668	97.71	2,509,534,332
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,964,738,000	9,776,441,000	9,380,833,186	0	9,380,833,186	95.95	395,607,814
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,964,738,000	9,776,441,000	9,380,833,186	0	9,380,833,186	95.95	395,607,814
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	200,000,000	0	0	0	0		0
522112	Belanja Langganan Telepon	240,000,000	29,935,000	29,907,879	0	29,907,879	99.91	27,121
522131	Belanja Jasa Konsultan	254,030,000	1,138,500,000	1,136,026,245	0	1,136,026,245	99.78	2,473,755
522141	Belanja Sewa	2,761,480,000	4,551,787,000	4,512,613,679	0	4,512,613,679	99.14	39,173,321
522151	Belanja Jasa Profesi	8,044,500,000	8,465,165,000	7,819,389,412	8,580,000	7,810,809,412	92.37	654,355,588
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,606,000,000	10,326,342,000	9,905,061,543	9,356,793	9,895,704,750	95.92	430,637,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	19,106,010,000	24,511,729,000	23,402,998,758	17,936,793	23,385,061,965	95.48	1,126,667,035
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,000,000,000	1,259,513,000	1,196,201,592	0	1,196,201,592	94.97	63,311,408
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,794,630,000	3,188,277,000	3,178,472,907	0	3,178,472,907	99.69	9,804,093
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,794,630,000	4,447,790,000	4,374,674,499	0	4,374,674,499	98.36	73,115,501
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,980,050,000	95,238,074,000	92,457,771,707	751,441,148	91,706,330,559	97.08	3,531,743,441
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,678,550,000	12,016,563,000	10,982,999,328	277,718,370	10,705,280,958	91.4	1,311,282,042
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,774,310,000	10,401,364,000	9,892,547,872	11,934,666	9,880,613,206	95.11	520,750,794
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,866,525,000	68,089,828,000	66,726,186,032	394,097,547	66,332,088,485	98	1,757,739,515
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	106,299,435,000	185,745,829,000	180,059,504,939	1,435,191,731	178,624,313,208	96.94	7,121,515,792
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	550,000,000	859,015,000	856,489,861	4,347,235	852,142,626	99.71	6,872,374
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	300,000,000	4,158,304,000	4,150,730,422	479,476,477	3,671,253,945	99.82	487,050,055
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	850,000,000	5,017,319,000	5,007,220,283	483,823,712	4,523,396,571	99.8	493,922,429
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	5,100,000,000	30,012,000,000	29,524,523,890	0	29,524,523,890	98.38	487,476,110
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	12,500,000,000	5,250,000,000	5,250,000,000	0	5,250,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	17,600,000,000	35,262,000,000	34,774,523,890	0	34,774,523,890	98.62	487,476,110

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:31 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	223,486,185,000	381,825,248,000	371,329,637,767	1,989,486,036	369,340,151,731	97.25	12,485,096,269
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,617,500,000	30,094,865,000	30,049,548,850	0	30,049,548,850	99.85	45,316,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,617,500,000	30,094,865,000	30,049,548,850	0	30,049,548,850	99.85	45,316,150
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,025,000,000	2,417,357,000	2,410,363,300	0	2,410,363,300	99.71	6,993,700
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	1,962,000,000	1,962,000,000	0	1,962,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,025,000,000	4,379,357,000	4,372,363,300	0	4,372,363,300	99.84	6,993,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,642,500,000	34,474,222,000	34,421,912,150	0	34,421,912,150	99.85	52,309,850
	JUMLAH BELANJA	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/05/24 4:32 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN PANGAN NASIONAL							
	Kode UAPPAW Tidak Ada							
690590	BADAN PANGAN NASIONAL	103,525,552,000	321,886,749,000	310,625,768,030	1,930,515,944	308,695,252,086	95.9	13,191,496,914
690699	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	2,645,501,000	2,645,501,000	2,520,425,560	0	2,520,425,560	95.27	125,075,440
690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	8,691,142,000	8,691,142,000	8,121,367,345	0	8,121,367,345	93.44	569,774,655
690701	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	8,234,297,000	8,234,297,000	8,156,518,339	0	8,156,518,339	99.06	77,778,661
690702	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI YOGYAKARTA	3,211,482,000	3,211,482,000	3,144,532,939	0	3,144,532,939	97.92	66,949,061
690703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	9,803,478,000	9,703,478,000	8,911,905,683	15,493,128	8,896,412,555	91.68	807,065,445
690704	DINAS PANGAN ACEH	5,733,924,000	5,733,924,000	5,456,730,773	0	5,456,730,773	95.17	277,193,227
690705	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	7,224,527,000	7,224,527,000	6,983,673,710	0	6,983,673,710	96.67	240,853,290
690706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	5,908,661,000	5,908,661,000	5,089,756,491	0	5,089,756,491	86.14	818,904,509
690707	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3,480,366,000	3,278,366,000	2,898,251,197	0	2,898,251,197	88.41	380,114,803
690708	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI	3,008,601,000	3,008,601,000	2,916,373,058	0	2,916,373,058	96.93	92,227,942
690709	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	6,026,655,000	6,026,655,000	5,747,274,917	0	5,747,274,917	95.36	279,380,083
690710	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	4,418,335,000	4,418,335,000	4,286,595,989	2,117,000	4,284,478,989	96.97	133,856,011
690711	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	3,221,127,000	3,221,127,000	3,177,117,568	0	3,177,117,568	98.63	44,009,432
690712	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3,093,016,000	3,093,016,000	2,694,855,455	0	2,694,855,455	87.13	398,160,545
690713	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	3,622,705,000	3,622,705,000	2,809,950,745	0	2,809,950,745	77.56	812,754,255
690714	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3,066,083,000	3,066,083,000	2,408,183,729	0	2,408,183,729	78.54	657,899,271
690715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	5,356,215,000	5,356,215,000	5,176,537,771	0	5,176,537,771	96.65	179,677,229
690716	DINAS PANGAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2,971,834,000	2,971,834,000	2,936,054,902	0	2,936,054,902	98.8	35,779,098
690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	7,312,944,000	7,312,944,000	7,177,865,336	0	7,177,865,336	98.15	135,078,664
690718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	3,239,428,000	3,339,428,000	2,886,763,198	0	2,886,763,198	86.44	452,664,802
690719	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU	2,944,589,000	3,042,589,000	2,955,199,290	14,994,712	2,940,204,578	96.63	102,384,422
690720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	4,774,701,000	4,774,701,000	4,632,084,892	1,734,282	4,630,350,610	96.98	144,350,390
690721	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3,663,040,000	3,663,040,000	3,419,770,860	6,945,000	3,412,825,860	93.17	250,214,140
690722	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,351,554,000	3,547,554,000	3,300,012,989	0	3,300,012,989	93.02	247,541,011
690723	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	2,857,913,000	2,857,913,000	2,852,140,000	0	2,852,140,000	99.8	5,773,000
690724	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU	2,868,907,000	2,868,907,000	2,797,760,434	0	2,797,760,434	97.52	71,146,566

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/05/24 4:32 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 125

BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
690725	DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	2,583,157,000	2,583,157,000	2,510,527,500	0	2,510,527,500	97.19	72,629,500
690726	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN	3,331,508,000	3,331,508,000	2,947,952,376	0	2,947,952,376	88.49	383,555,624
690727	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	2,398,088,000	2,398,088,000	2,232,031,909	8,968,700	2,223,063,209	92.7	175,024,791
690728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	2,380,263,000	2,380,263,000	2,352,878,417	0	2,352,878,417	98.85	27,384,583
690729	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2,583,763,000	2,583,763,000	2,565,176,779	0	2,565,176,779	99.28	18,586,221
690730	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	2,352,325,000	2,352,325,000	2,352,323,000	15,000,000	2,337,323,000	99.36	15,002,000
690731	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	4,085,625,000	4,183,625,000	3,982,765,664	0	3,982,765,664	95.2	200,859,336
690732	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2,254,200,000	2,254,200,000	2,127,562,692	0	2,127,562,692	94.38	126,637,308
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229
	JUMLAH BELANJA 01	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21617782229
	JUMLAH BELANJA	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 16/05/24 4:32 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN PANGAN NASIONAL							
51	BELANJA PEGAWAI	20,096,821,000	48,477,233,000	39,403,139,620	6,282,730	39,396,856,890	81.27	9,080,376,110
52	BELANJA BARANG	223,486,185,000	381,825,248,000	371,329,637,767	1,989,486,036	369,340,151,731	96.73	12,485,096,269
53	BELANJA MODAL	2,642,500,000	34,474,222,000	34,421,912,150	0	34,421,912,150	99.85	52,309,850
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN PANGAN NASIONAL	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229
	JUMLAH BELANJA	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/24 4:33 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,910,970,000	12,780,623,000	10,987,063,480	0	10,987,063,480	85.97	1,793,559,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	126,000	1,703,000	149,952	0	149,952	8.81	1,553,048
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	788,186,000	1,109,706,000	739,688,862	0	739,688,862	66.66	370,017,138
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	229,880,000	335,409,000	201,325,218	0	201,325,218	60.02	134,083,782
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	550,620,000	1,271,650,000	900,620,000	0	900,620,000	70.82	371,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,751,582,000	1,961,634,000	1,693,778,000	0	1,693,778,000	86.35	267,856,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,238,000	142,179,000	107,068,972	0	107,068,972	75.31	35,110,028
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	577,912,000	764,539,000	546,698,580	0	546,698,580	71.51	217,840,420
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,188,296,000	892,376,000	807,401,250	1,406,000	805,995,250	90.48	86,380,750
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	165,270,000	266,945,000	181,285,000	0	181,285,000	67.91	85,660,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	347,104,000	1,724,864,000	983,398,800	0	983,398,800	57.01	741,465,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	104,000	27,676	0	27,676	26.61	76,324
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,709,000	98,488,000	30,703,680	0	30,703,680	31.18	67,784,320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,882,000	37,332,000	6,704,452	0	6,704,452	17.96	30,627,548
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	462,000,000	103,500,000	77,000,000	0	77,000,000	74.4	26,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,332,000	62,266,000	38,092,920	0	38,092,920	61.18	24,173,080
511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,824,000	174,060,000	159,449,629	421,800	159,027,829	91.61	15,032,171
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,935,887,000	21,163,543,000	20,068,906,196	4,454,930	20,064,451,266	94.83	1,099,091,734
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	5,586,312,000	1,873,776,953	0	1,873,776,953	33.54	3,712,535,047
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	20,096,821,000	48,477,233,000	39,403,139,620	6,282,730	39,396,856,890	81.28	9,080,376,110
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,583,729,000	7,090,350,000	6,968,146,524	9,801,000	6,958,345,524	98.28	132,004,476
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345,840,000	251,335,000	143,446,449	0	143,446,449	57.07	107,888,551
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,771,560,000	1,852,126,000	1,821,216,000	832,500	1,820,383,500	98.33	31,742,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,240,000	129,150,000	123,528,271	0	123,528,271	95.65	5,621,729
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	412,438,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	25,343,875,000	34,201,214,000	32,322,438,582	676,618	32,321,761,964	94.51	1,879,452,036
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,485,850,000	20,533,420,000	20,221,670,000	30,468,500	20,191,201,500	98.48	342,218,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,856,840,000	53,006,545,000	52,729,436,386	10,755,182	52,718,681,204	99.48	287,863,796
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,964,738,000	9,776,441,000	9,380,833,186	0	9,380,833,186	95.95	395,607,814
522111	Belanja Langganan Listrik	200,000,000	0	0	0	0	0	0
522112	Belanja Langganan Telepon	240,000,000	29,935,000	29,907,879	0	29,907,879	99.91	27,121
522131	Belanja Jasa Konsultan	254,030,000	1,138,500,000	1,136,026,245	0	1,136,026,245	99.78	2,473,755
522141	Belanja Sewa	2,761,480,000	4,551,787,000	4,512,613,679	0	4,512,613,679	99.14	39,173,321
522151	Belanja Jasa Profesi	8,044,500,000	8,465,165,000	7,819,389,412	8,580,000	7,810,809,412	92.37	654,355,588
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,606,000,000	10,326,342,000	9,905,061,543	9,356,793	9,895,704,750	95.92	430,637,250
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,000,000,000	1,259,513,000	1,196,201,592	0	1,196,201,592	94.97	63,311,408
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,794,630,000	3,188,277,000	3,178,472,907	0	3,178,472,907	99.69	9,804,093

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 125 BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 16/05/24 4:33 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,980,050,000	95,238,074,000	92,457,771,707	751,441,148	91,706,330,559	97.08	3,531,743,441
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,678,550,000	12,016,563,000	10,982,999,328	277,718,370	10,705,280,958	91.4	1,311,282,042
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,774,310,000	10,401,364,000	9,892,547,872	11,934,666	9,880,613,206	95.11	520,750,794
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,866,525,000	68,089,828,000	66,726,186,032	394,097,547	66,332,088,485	98	1,757,739,515
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	550,000,000	859,015,000	856,489,861	4,347,235	852,142,626	99.71	6,872,374
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	300,000,000	4,158,304,000	4,150,730,422	479,476,477	3,671,253,945	99.82	487,050,055
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	5,100,000,000	30,012,000,000	29,524,523,890	0	29,524,523,890	98.38	487,476,110
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	12,500,000,000	5,250,000,000	5,250,000,000	0	5,250,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	223,486,185,000	381,825,248,000	371,329,637,767	1,989,486,036	369,340,151,731	97.25	12,485,096,269
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,617,500,000	30,094,865,000	30,049,548,850	0	30,049,548,850	99.85	45,316,150
536111	Belanja Modal Lainnya	1,025,000,000	2,417,357,000	2,410,363,300	0	2,410,363,300	99.71	6,993,700
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	1,962,000,000	1,962,000,000	0	1,962,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,642,500,000	34,474,222,000	34,421,912,150	0	34,421,912,150	99.85	52,309,850
	JUMLAH RUPIAH MURNI	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229
	TOTAL	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 125

BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 16/05/24 4:33 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HA	Nama Program Tidak Ada							
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	71,330,986,000	139,426,877,000	135,213,740,922	449,616,998	134,764,123,924	3236.48	4,662,753,076
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	55,728,850,000	109,132,947,000	106,265,660,230	688,132,482	105,577,527,748	3340.78	3,555,419,252
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	52,615,118,000	96,734,895,000	93,924,456,846	86,820,604	93,837,636,242	3339.83	2,897,258,758
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HA	179,674,954,000	345,294,719,000	335,403,857,998	1,224,570,084	334,179,287,914	97.136	11,115,431,086
WA	Nama Program Tidak Ada							
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	66,550,552,000	119,481,984,000	109,750,831,539	771,198,682	108,979,632,857	3309.75	10,502,351,143
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	66,550,552,000	119,481,984,000	109,750,831,539	771,198,682	108,979,632,857	91.856	10,502,351,143
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.778	21,617,782,229
	JUMLAH	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 125

BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 16/05/24 4:33 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	251,200	0	251,200	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	251,200	0	251,200	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	200,919,767	0	200,919,767	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,135,920	0	2,135,920	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	203,055,687	0	203,055,687	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	203,306,887	0	203,306,887	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	203,306,887	0	203,306,887	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 125

BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 16/05/24 4:33 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN PANGAN NASIONAL					
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
690590	BADAN PANGAN NASIONAL	0	145,518,177	0	145,518,177	0
690699	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0	2,135,920	0	2,135,920	0
690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	0	24,012,045	0	24,012,045	0
690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	31,389,545	0	31,389,545	0
690718	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	251,200	0	251,200	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	203,306,887	0	203,306,887	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN PANGAN NASIONAL	0	203,306,887	0	203,306,887	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	203,306,887	0	203,306,887	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 125

BADAN PANGAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 16/05/24 4:34 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN PANGAN NASIONAL					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	251,200	0	251,200	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	200,919,767	0	200,919,767	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,135,920	0	2,135,920	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN PANGAN NASIONAL	0	203,306,887	0	203,306,887	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	203,306,887	0	203,306,887	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,910,970,000	12,780,623,000	10,987,063,480	0	10,987,063,480	85.97	1,793,559,520
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	126,000	1,703,000	149,952	0	149,952	8.81	1,553,048
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	788,186,000	1,109,706,000	739,688,862	0	739,688,862	66.66	370,017,138
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	229,880,000	335,409,000	201,325,218	0	201,325,218	60.02	134,083,782
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	550,620,000	1,271,650,000	900,620,000	0	900,620,000	70.82	371,030,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,751,582,000	1,961,634,000	1,693,778,000	0	1,693,778,000	86.35	267,856,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,238,000	142,179,000	107,068,972	0	107,068,972	75.31	35,110,028
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	577,912,000	764,539,000	546,698,580	0	546,698,580	71.51	217,840,420
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,188,296,000	892,376,000	807,401,250	1,406,000	805,995,250	90.48	86,380,750
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	165,270,000	266,945,000	181,285,000	0	181,285,000	67.91	85,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	17,268,080,000	19,526,764,000	16,165,079,314	1,406,000	16,163,673,314	82.78	3,363,090,686
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	347,104,000	1,724,864,000	983,398,800	0	983,398,800	57.01	741,465,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	104,000	27,676	0	27,676	26.61	76,324
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,709,000	98,488,000	30,703,680	0	30,703,680	31.18	67,784,320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,882,000	37,332,000	6,704,452	0	6,704,452	17.96	30,627,548
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	462,000,000	103,500,000	77,000,000	0	77,000,000	74.4	26,500,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,332,000	62,266,000	38,092,920	0	38,092,920	61.18	24,173,080
511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,824,000	174,060,000	159,449,629	421,800	159,027,829	91.61	15,032,171
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	892,854,000	2,200,614,000	1,295,377,157	421,800	1,294,955,357	58.86	905,658,643
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,935,887,000	21,163,543,000	20,068,906,196	4,454,930	20,064,451,266	94.83	1,099,091,734
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	5,586,312,000	1,873,776,953	0	1,873,776,953	33.54	3,712,535,047
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,935,887,000	26,749,855,000	21,942,683,149	4,454,930	21,938,228,219	82.03	4,811,626,781
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	20,096,821,000	48,477,233,000	39,403,139,620	6,282,730	39,396,856,890	81.28	9,080,376,110
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,583,729,000	7,090,350,000	6,968,146,524	9,801,000	6,958,345,524	98.28	132,004,476
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345,840,000	251,335,000	143,446,449	0	143,446,449	57.07	107,888,551
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,771,560,000	1,852,126,000	1,821,216,000	832,500	1,820,383,500	98.33	31,742,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,240,000	129,150,000	123,528,271	0	123,528,271	95.65	5,621,729
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	412,438,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	9,184,807,000	9,322,961,000	9,056,337,244	10,633,500	9,045,703,744	97.14	277,257,256

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:34 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	25,343,875,000	34,201,214,000	32,322,438,582	676,618	32,321,761,964	94.51	1,879,452,036
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,485,850,000	20,533,420,000	20,221,670,000	30,468,500	20,191,201,500	98.48	342,218,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,856,840,000	53,006,545,000	52,729,436,386	10,755,182	52,718,681,204	99.48	287,863,796
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	57,686,565,000	107,741,179,000	105,273,544,968	41,900,300	105,231,644,668	97.71	2,509,534,332
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,964,738,000	9,776,441,000	9,380,833,186	0	9,380,833,186	95.95	395,607,814
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	7,964,738,000	9,776,441,000	9,380,833,186	0	9,380,833,186	95.95	395,607,814
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	200,000,000	0	0	0	0		0
522112	Belanja Langganan Telepon	240,000,000	29,935,000	29,907,879	0	29,907,879	99.91	27,121
522131	Belanja Jasa Konsultan	254,030,000	1,138,500,000	1,136,026,245	0	1,136,026,245	99.78	2,473,755
522141	Belanja Sewa	2,761,480,000	4,551,787,000	4,512,613,679	0	4,512,613,679	99.14	39,173,321
522151	Belanja Jasa Profesi	8,044,500,000	8,465,165,000	7,819,389,412	8,580,000	7,810,809,412	92.37	654,355,588
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,606,000,000	10,326,342,000	9,905,061,543	9,356,793	9,895,704,750	95.92	430,637,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	19,106,010,000	24,511,729,000	23,402,998,758	17,936,793	23,385,061,965	95.48	1,126,667,035
5231	Belanja Pemeliharaan							
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,000,000,000	1,259,513,000	1,196,201,592	0	1,196,201,592	94.97	63,311,408
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,794,630,000	3,188,277,000	3,178,472,907	0	3,178,472,907	99.69	9,804,093
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,794,630,000	4,447,790,000	4,374,674,499	0	4,374,674,499	98.36	73,115,501
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,980,050,000	95,238,074,000	92,457,771,707	751,441,148	91,706,330,559	97.08	3,531,743,441
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,678,550,000	12,016,563,000	10,982,999,328	277,718,370	10,705,280,958	91.4	1,311,282,042
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,774,310,000	10,401,364,000	9,892,547,872	11,934,666	9,880,613,206	95.11	520,750,794
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,866,525,000	68,089,828,000	66,726,186,032	394,097,547	66,332,088,485	98	1,757,739,515
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	106,299,435,000	185,745,829,000	180,059,504,939	1,435,191,731	178,624,313,208	96.94	7,121,515,792
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	550,000,000	859,015,000	856,489,861	4,347,235	852,142,626	99.71	6,872,374
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	300,000,000	4,158,304,000	4,150,730,422	479,476,477	3,671,253,945	99.82	487,050,055
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	850,000,000	5,017,319,000	5,007,220,283	483,823,712	4,523,396,571	99.8	493,922,429
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	5,100,000,000	30,012,000,000	29,524,523,890	0	29,524,523,890	98.38	487,476,110
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	12,500,000,000	5,250,000,000	5,250,000,000	0	5,250,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	17,600,000,000	35,262,000,000	34,774,523,890	0	34,774,523,890	98.62	487,476,110

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 16/05/24 4:34 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 125 BADAN PANGAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	223,486,185,000	381,825,248,000	371,329,637,767	1,989,486,036	369,340,151,731	97.25	12,485,096,269
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,617,500,000	30,094,865,000	30,049,548,850	0	30,049,548,850	99.85	45,316,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,617,500,000	30,094,865,000	30,049,548,850	0	30,049,548,850	99.85	45,316,150
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,025,000,000	2,417,357,000	2,410,363,300	0	2,410,363,300	99.71	6,993,700
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	1,962,000,000	1,962,000,000	0	1,962,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,025,000,000	4,379,357,000	4,372,363,300	0	4,372,363,300	99.84	6,993,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,642,500,000	34,474,222,000	34,421,912,150	0	34,421,912,150	99.85	52,309,850
	JUMLAH BELANJA	246,225,506,000	464,776,703,000	445,154,689,537	1,995,768,766	443,158,920,771	95.78	21,617,782,229

LAMPIRAN SATKER USULAN JURNAL KOREKSI

24.594.027.938

24.594.027.938

-

Eselon1	Satker	Akun	Nama Akun	Unaudited 2023	KOREKSI		Asersi Final
					Debit	Kredit	
12501	690731	117111	Barang Konsumsi	90.734.900		90.734.900	-
12501	690731	593111	Beban Persediaan konsumsi		90.734.900		90.734.900
12501	690731	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	45.000		45.000	-
12501	690731	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	45.000		45.000
12501	690731	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyar	1.245.606.490		1.245.606.490	-
12501	690731	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	1.245.606.490		1.245.606.490
12501	690590	117111	Barang Konsumsi	-	59.300.000		59.300.000
12501	690590	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-		59.300.000	(59.300.000)
12501	690590	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	59.300.000		59.300.000
12501	690590	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	41.381.032.459		59.300.000	41.321.732.459
12501	690590	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerinta	1.771.310.810	535.666.774		2.306.977.584
12501	690590	132111	Peralatan dan Mesin	99.842.275.367		535.666.774	99.306.608.593
12501	690590	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.041.538.222	39.504.167		7.081.042.389
12501	690590	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunak	(1.771.310.810)		39.504.167	(1.810.814.977)
12501	690590	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44.026.129.835)	496.162.607		(43.529.967.228)
12501	690590	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunak	(1.771.310.810)		496.162.607	(2.267.473.417)
12501	690590	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	17.187.525.000		17.187.525.000
12501	690590	593111	Beban Persediaan konsumsi	22.326.349.621		17.187.525.000	5.138.824.621
12501	690704	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	1.230.000.000		1.230.000.000
12501	690704	593111	Beban Persediaan konsumsi	1.373.558.910		1.230.000.000	143.558.910
12501	690706	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	1.231.069.000		1.231.069.000
12501	690706	593111	Beban Persediaan konsumsi	1.385.557.500		1.231.069.000	154.488.500
12501	690720	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	1.198.560.000		1.198.560.000
12501	690720	593111	Beban Persediaan konsumsi	1.198.560.000		1.198.560.000	-
12501	690715	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	-	1.206.700.000		1.206.700.000
12501	690715	593111	Beban Persediaan konsumsi	1.333.938.865		1.206.700.000	127.238.865
12501	690722	593111	Beban Persediaan konsumsi	115.544.353	13.829.000		129.373.353
12501	690722	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Disera	13.829.000		13.829.000	-
12501	690721	593111	Beban Persediaan konsumsi	118.401.500	25.000		118.426.500
12501	690721	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual al	25.000		25.000	-

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN										
125	Eselon 1 : Badan Pangan Nasional									
A. PENDAPATAN										
		UNAUDITED			KOREKSI			ASERSI FINAL		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
42	PNBP Lainnya	203.306.887	0	203.306.887	0	0	0	203.306.887	0	203.306.887
TOTAL PENDAPATAN		203.306.887	0	203.306.887	0	0	0	203.306.887	0	203.306.887
B. BELANJA										
JENIS	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI			AUDITED		
BELANJA		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
51	Belanja Pegawai	39.403.139.620	6.282.730	39.396.856.890	0	0	0	39.403.139.620	6.282.730	39.396.856.890
52	Belanja Barang	371.329.637.767	1.989.486.036	369.340.151.731	0	0	0	371.329.637.767	1.989.486.036	369.340.151.731
53	Belanja Modal	34.421.912.150	0	34.421.912.150	0	0	0	34.421.912.150	0	34.421.912.150
TOTAL		445.154.689.537	1.995.768.766	443.158.920.771	0	0	0	445.154.689.537	1.995.768.766	443.158.920.771

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2023
PER 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 Nomor : NKF-097/018/PB.6/2023
 Tanggal : 04 May 2023

K/1 : Eselon 1 : Badan Pangan Nasional
BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED MANDIRI/BPK		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara kas	156.330.000	-	-	156.330.000
Kas pada BLU	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	-
Piutang Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak	-	-	-	-
Piutang Pajak (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan BLU	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	1.336.825.390	59.300.000	1.336.386.390	59.739.000
Persediaan Belum Register	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	1.493.155.390	59.300.000	1.336.386.390	216.069.000
ASET TETAP				
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	99.842.275.367	-	535.666.774	99.306.608.593
Gedung dan Bangunan	261.660.000	-	-	261.660.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44.026.129.835)	496.162.607	-	(43.529.967.228)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.120.632)	-	-	(38.120.632)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP	56.039.684.900	496.162.607	535.666.774	56.000.180.733
Properti Investasi	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	4.120.040.050	-	-	4.120.040.050
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	1.288.600.000	-	-	1.288.600.000
Dana Penjaminan	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
Aset Lain-lain	1.771.310.810	535.666.774	-	2.306.977.584
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(1.771.310.810)	-	535.666.774	(2.306.977.584)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.479.779.664)	-	-	(1.479.779.664)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-	-	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	3.928.860.386	535.666.774	535.666.774	3.928.860.386
JUMLAH ASET	61.461.700.676	1.091.129.381	2.407.719.938	60.145.110.119
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.444.930.000	-	-	1.444.930.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK	1.444.930.000	-	-	1.444.930.000
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PANJANG	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	1.444.930.000	-	-	1.444.930.000
EKUITAS	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	61.461.700.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	60.145.110.119

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)

Eselon 1 : Badan Pangan Nasional

URAIAN	Unaudited	KOREKSI AUDITED MANDIRI/BPK		Audited
		Debit	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.387.120	-	-	2.387.120
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.387.120	-	-	2.387.120
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-
PENDAPATAN PENYESUAIAN				
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	2.387.120	-	-	2.387.120
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	39.396.856.890	-	-	39.396.856.890
Beban Persediaan	30.968.615.286	104.588.900	22.053.854.000	9.019.350.186
Beban Barang dan Jasa	137.148.575.997	-	59.300.000	137.089.275.997
Beban Pemeliharaan	4.376.423.499	45.000	-	4.376.468.499
Beban Perjalanan Dinas	183.133.709.779	-	-	183.133.709.779
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.871.267.400	23.299.460.490	13.854.000	35.156.873.890
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.520.440.087	39.504.167	-	7.559.944.254
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	414.415.888.938	23.443.598.557	22.127.008.000	415.732.479.495
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(414.413.501.818)	(23.443.598.557)	(22.127.008.000)	(415.730.092.375)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-

Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(414.212.582.051)	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	(415.529.172.608)

**LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2023
PER 31 DESEMBER 2023**

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : NKF-097/018/PB.6/2023
Tanggal : 04 May 2023**

K/L : Eselon 1 : Badan Pangan Nasional

BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED MANDIRI/BPK		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	-			0
SURPLUS/DEFISIT LO	(414.212.582.051)	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	(415.529.172.608)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	0
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	0
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	-	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	-	-	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	0
Koreksi Lain-lain	-	-	-	0
Penyesuaian SAL BLU	-	-	-	0
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	-	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	474.229.352.727	0	0	474.229.352.727
Ditagihkan ke Entitas Lain	443.158.920.771	-	-	443.158.920.771
Diterima dari Entitas Lain	(203.306.887)	-	-	-203.306.887
Transfer Keluar	-	-	-	0
Transfer Masuk	31.273.738.843	-	-	31.273.738.843
Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	-	-	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	-	0
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119
EKUITAS AKHIR	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN BADAN PANGAN NASIONAL (BA 125) TAHUN 2023
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2023 (AUDITED)**

Nomor : NKF- 078 /125/PB.6/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal 3 Mei 2024, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam **Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional (BA 125) Tahun 2023**, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas **Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional (BA 125) Tahun 2023** dan untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2023 (Audited)**.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Badan Pangan Nasional (BA 125)** menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara) **paling lambat tanggal 13 Mei 2024**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Badan Pangan Nasional
Selaku Tim Penyusun LK-KL

Todilah

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN

Idris Aswin

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP

Mohamad Hadad

MENGETAHUI
Tim Pemeriksa BPK


Dedy Arman

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	156.330.000			156.330.000
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	-			-
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Perpajakan	-			-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-			-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	-			-
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-			-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-			-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-			-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	-	-	-
Persediaan	1.336.825.390	59.300.000	1.336.386.390	59.739.000
Persediaan yang Belum Diregister	-			-
Jumlah Aset Lancar	1.493.155.390	59.300.000	1.336.386.390	216.069.000

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET TETAP				
Tanah	-			-
Peralatan dan Mesin	99.842.275.367		535.666.774	99.306.608.593
Gedung dan Bangunan	261.660.000			261.660.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
Aset Tetap Lainnya	-			-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-			-
Aset Konsesi Jasa	-			-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-			-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44.026.129.835)	496.162.607		(43.529.967.228)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.120.632)			(38.120.632)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-			-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Aset Tetap	56.039.684.900	496.162.607	535.666.774	56.000.180.733
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	-			-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-			-
Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-			-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	4.120.040.050			4.120.040.050
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-			-
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	1.288.600.000			1.288.600.000
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	1.771.310.810	535.666.774		2.306.977.584
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ketiga	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	-			-
Akum. Penyusutan AT yg TDK digunakan	(1.771.310.810)		535.666.774	(2.306.977.584)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.479.779.664)			(1.479.779.664)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	-			-
Jumlah Aset Lainnya	3.928.860.386	535.666.774	535.666.774	3.928.860.386
JUMLAH ASET	61.461.700.676	1.091.129.381	2.407.719.938	60.145.110.119
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.444.930.000			1.444.930.000
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Pendapatan Diterima Dimuka	-			-
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KPPN	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.444.930.000	-	-	1.444.930.000
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Kewajiban Konsesi Jasa	-			-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN	1.444.930.000	-	-	1.444.930.000

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	61.461.700.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	60.145.110.119



LAMPIRAN NOTA
KESEPAKATAN
Nomor : /PB.6/2024
Tanggal : 2024

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI DARI BPK DAN KL		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	-			-
SURPLUS/DEFISIT LO	(414.212.582.051)	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	(415.529.172.608)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Penyesuaian SILPA	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	-			-
Revaluasi Aset	-			-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-			-
Koreksi Atas Reklasifikasi Aset	-			-
Koreksi atas Transaksi BMN Lainnya	-			-
Koreksi Lain-lain	-			-
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	-	-	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	474.229.352.727			474.229.352.727
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119
EKUITAS AKHIR	60.016.770.676	(23.384.298.557)	(22.067.708.000)	58.700.180.119



LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

K/L : Badan Pangan Nasional
BA : 125

URAIAN	UNAUDITED	KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-
Pendapatan Cukai	-			-
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-
Pendapatan Bea Masuk	-			-
Pendapatan Bea Keluar	-			-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-			-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.387.120			2.387.120
Pendapatan Badan Layanan Umum	-			-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.387.120			2.387.120
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	-			-
Jumlah Pendapatan Hibah	-			-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	2.387.120			2.387.120
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	39.396.856.890			39.396.856.890
Beban Persediaan	30.968.615.286	104.588.900	22.053.854.000	9.019.350.186
Beban Barang dan Jasa	137.148.575.997		59.300.000	137.089.275.997
Beban Pemeliharaan	4.376.423.499	45.000		4.376.468.499
Beban Perjalanan Dinas	183.133.709.779			183.133.709.779
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.871.267.400	23.299.460.490	13.854.000	35.156.873.890
Beban Bunga	-			-
Beban Subsidi	-			-
Beban Hibah	-			-
Beban Bantuan Sosial	-			-
Beban Transfer	-			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.520.440.087	39.504.167		7.559.944.254
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-			-
Beban Lain-lain	-			-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	414.415.888.938	23.443.598.557	22.127.008.000	415.732.479.495
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 414.413.501.818	23.443.598.557	22.127.008.000	415.730.092.375
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-			-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	200.919.767	59.300.000	59.300.000	200.919.767	-
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	414.212.582.051	23.384.298.557	22.067.708.000	415.529.172.608	

Jakarta, ... 2024
Badan Pangan Nasional



Kementerian Keuangan



(Mohamad Hadad)

Tim Pemeriksa BPK

(Dedy Arman)

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : /PB.6/2024

Tanggal : 2024

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

K/L : Badan Pangan Nasional

BA : 125

URAIAN	REALISASI UNAUDITED	KOREKSI		REALISASI AUDITED
		DEBIT	KREDIT	
1	2	3	4	5
Pendapatan Perpajakan	-			-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	203.306.887	-	-	203.306.887
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-
Pendapatan dari KND	-			-
Pendapatan BLU	-			-
Pendapatan PNBP Lainnya	203.306.887			203.306.887
Pendapatan Hibah	-			-
TOTAL PENDAPATAN	203.306.887	-	-	203.306.887
Belanja Pegawai	39.396.856.890			39.396.856.890
Belanja Barang dan Jasa	369.340.151.731			369.340.151.731
Belanja Modal	34.421.912.150			34.421.912.150
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-			-
Belanja Subsidi	-			-
Belanja Hibah	-			-
Belanja Bantuan Sosial	-			-
Belanja Belanja Lain-lain	-			-
TOTAL BELANJA	443.158.920.771	-	-	443.158.920.771
Dana Bagi Hasil	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-			-
Dana Alokasi Khusus	-			-
Dana Otonomi Khusus	-			-
Dana Keistimewaan DIY	-			-
Dana Desa	-			-
Insentif Fiskal	-			-
TOTAL TKD	-	-	-	-
Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	-

Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-	-
TOTAL PEMBIAYAAN	-	-	-	-



LAMPIRAN SATKER USULAN JURNAL KOREKSI

OK
24.594.027.938 24.594.027.938

KOREKSI

Eselon1	Satker	Akun	Nama Akun	Normal	Unaudited 2023	Debit	Kredit	Asersi Final
12501	690731	117111	Barang Konsumsi	D	90.734.900		90.734.900	-
12501	690731	593111	Beban Persediaan konsumsi	D		90.734.900		90.734.900
12501	690731	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	D	45.000		45.000	-
12501	690731	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	D	-	45.000		45.000
12501	690731	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	D	1.245.606.490		1.245.606.490	-
12501	690731	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	1.245.606.490		1.245.606.490
12501	690590	117111	Barang Konsumsi	D	-	59.300.000		59.300.000
12501	690590	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	K	-		59.300.000	(59.300.000)
12501	690590	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	K	-	59.300.000		59.300.000
12501	690590	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	D	41.381.032.459		59.300.000	41.321.732.459
12501	690590	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	D	1.771.310.810	535.666.774		2.306.977.584
12501	690590	132111	Peralatan dan Mesin	D	99.842.275.367		535.666.774	99.306.608.593
12501	690590	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	K	(44.026.129.835)	535.666.774		(43.490.463.061)
12501	690590	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	K	(1.771.310.810)		535.666.774	(2.306.977.584)
12501	690590	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	17.187.525.000		17.187.525.000
12501	690590	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	22.326.349.621		17.187.525.000	5.138.824.621
12501	690704	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	1.230.000.000		1.230.000.000
12501	690704	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	1.373.558.910		1.230.000.000	143.558.910
12501	690706	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	1.231.069.000		1.231.069.000
12501	690706	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	1.385.557.500		1.231.069.000	154.488.500
12501	690720	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	1.198.560.000		1.198.560.000
12501	690720	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	1.198.560.000		1.198.560.000	-
12501	690715	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	-	1.206.700.000		1.206.700.000
12501	690715	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	1.333.938.865		1.206.700.000	127.238.865
12501	690722	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	115.544.353	13.829.000		129.373.353
12501	690722	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	D	13.829.000		13.829.000	-
12501	690721	593111	Beban Persediaan konsumsi	D	118.401.500	25.000		118.426.500
12501	690721	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	D	25.000		25.000	-
					-			



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA**

Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan
Kode Pos : 20143 ; Telp/Fax. 7863567 – 78060633
Website : <http://distan.sumutprov.go.id>//E-mail:distan_provsu@yahoo.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 900/237.15/XII/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Edy Warsito, SP
NIP : 19780520 201001 1 016
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan APBD
2. Nama : Risnandar, S.Sos
NIP : 19750806.200003.1.001
Jabatan : Operator SAIBA
3. Nama : Jumiati, SST
NIP : 19840814 200803 2 001
Jabatan : Operator SIMAK BMN

Menyatakan bahwa kami telah melakukan Pemeriksaan Fisik (*Stock Opname*) Barang Persediaan Untuk tanggal neraca yang berakhir pada 31 Desember 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*). Adapun total nilai barang meliputi :

a. Barang Konsumsi	: Rp.	439.000,-
b. Bahan untuk pemeliharaan	: Rp.	0,-
c. Suku cadang	: Rp.	0,-
d. Bahan baku	: Rp.	0,-
e. Persediaan Lainnya	: Rp.	0,-
		=====
Total	: Rp.	439.000,-

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksaan Fisik :

1. Edy Warsito, SP 19780520 201001 1 016
2. Risnandar, S.Sos 19750806.200003.1.001
3. Jumiati, SST 19840814 200803 2 001

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Nomor: 520/BA/805 /XII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Asrul. S.Pi

Telah melaksanakan *stock opname* barang persediaan Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, baik secara administrasi maupun fisik dengan hasil sebagaimana terlampir :

NO	URAIAN	NILAI
1	Barang Konsumsi	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 0-

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)



0730404 200604 1 024

Penerima Tugas / Petugas Stock Opname:

1. Asrul. S.Pi.....



DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Alamat : Jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng Komp.Perkantoran Pemprov.Sul-Bar,Rangas Mamuju

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN (690731) Nomor : 520/BA/746/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ASRUL. S. PI
NIP : 19821116 201001 1 019
Jabatan : Petugas SAKTI (Aset Tetap)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab unit akuntansi barang pada satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : AHMAD. S. IP
NIP : 19840810 201001 1 026
Jabatan : Petugas SAKTI (GLP)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab unit akuntansi keuangan pada satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Nama Perkiraan	UAPPAB	UAPPA	Selisih
1	Barang Konsumsi			0
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			0
4	Irigasi			0
5	Software			0
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			0
7	Aset Tak Berwujud yang dihentikan penggunaannya dalam operasi Pemerintahan			0
8	JUMLAH			0
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			0
10	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			0
11	Akumulasi Penyusutan Irigasi			0

12	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			0
13	Akumulasi Penyusutan Software			0
14	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud/Software yang tidak digunakan			0
15	JUMLAH PENYUSUTAN			0
16	JUMLAH			0

Demikian Berita Acara ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas SAKTI (GLP)

Petugas SAKTI (Aset Tetap)

Ahmad S. IP

AHMAD. S. IP
NIP. 19840810 201001 1 026



P. 1982.116 201001 1 019

TANDA TERIMA PENYERAHAN MAKANAN KUDAPAN PANGAN BERGIZI

Telah diterima :

Item : Paket Makanan Kudapan (Rolade Ayam, Sate Telur Puyuh, dan Susu UHT 200 ml)
Jumlah : 116 Paket
Kelayakan dan Keamanan Pangan:

Indikator	Baik	Biasa	Kurang	Keterangan
Warna	✓			
Rasa	✓			
Aroma	✓			

Tanggal : 23 Oktober 2023
Tempat : SD 007 TAMALANTIK, Desa Tamalantik, Kec. Tandukalua, Kab. Mamasa
Penerima : Kepala Sekolah / Panitia
Nomor Kontak HP:

Pada Kegiatan Kegiatan Pemberian Kudapan Pangan Bergizi

Yang Menyerahkan
CV. Dian Satwa

[Handwritten Signature]



Mengesahkan
pejabat pembuat komitmen

[Handwritten Signature]

Adnan, SP
NP 19790404 2006041024

TANDA TERIMA PENYERAHAN MAKANAN KUDAPAN PANGAN BERGIZI

Telah diterima :

Item : Paket Makanan Kudapan (Rolade Ayam, Sate Telur Puyuh, dan Susu UHT
200 ml)

Jumlah : 118 Paket

Kelayakan dan Keamanan Pangan:

Indikator	Baik	Biasa	Kurang	Keterangan
Warna	✓			
Rasa	✓			
Aroma	✓			

Tanggal : 23 Oktober 2023

Tempat : SD 008 BALABATU, Desa Balabatu, Kec. Tandukalua, Kab. Mamasa

Penerima : Kepala Sekolah / Panitia

Nomor Kontak HP: 0812 4141 9021

Pada Kegiatan Kegiatan Pemberian Kudapan Pangan Bergizi

Yang Menyerahkan
CV. Dian Satria



Penerima,
Kepala Sekolah



MARLIAN L, S-Pd

Mengetahui
pejabat pembuat komitmen

Adnan, SP

MIP. 197904104 2006041024

TANDA TERIMA PENYERAHAN MAKANAN KUDAPAN PANGAN BERGIZI

Telah diterima :

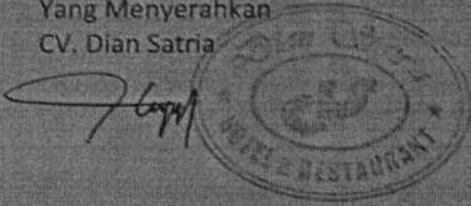
Item : Paket Makanan Kudapan (Rolade Ayam, Sate Telur Puyuh, dan Susu UHT
200 ml)
Jumlah : 88 Paket
Kelayakan dan Keamanan Pangan:

Indikator	Baik	Biasa	Kurang	Keterangan
Warna	✓			
Rasa	✓			
Aroma	✓			

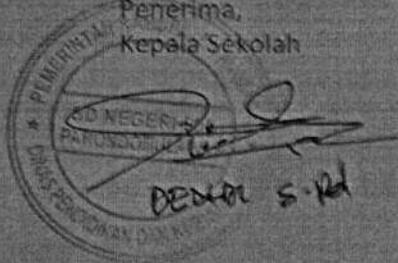
Tanggal : 23 Oktober 2023
Tempat : SD 006 PARONDOBULAWAN, Kec. Tandukalua, Kab. Mamasa
Penerima : Kepala Sekolah / Panitia
Nomor Kontak HP: 0812 4595 2408

Pada Kegiatan Kegiatan Pemberian Kudapan Pangan Bergizi

Yang Menyerahkan
CV. Dian Satria



Penerima,
Kepala Sekolah



Mengetahui
pejabat pembuat komitmen

Adnan, SP
Mip. 19780904 2006091024

TANDA TERIMA PENYERAHAN MAKANAN KUDAPAN PANGAN BERGIZI

Telah diterima :

Item : Paket Makanan Kudapan (Rolade Ayam, Sate Telur Puyuh, dan Susu UHT 200 ml)
Jumlah : 31 Paket
Kelayakan dan Keamanan Pangan:

Indikator	Baik	Biasa	Kurang	Keterangan
Warna	✓			
Rasa	✓			
Aroma	✓			

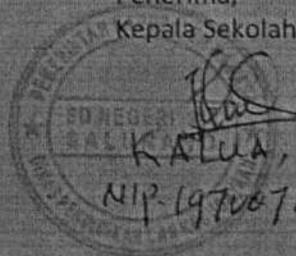
Tanggal : 23 Oktober 2023
Tempat : SD 013 SALURANO, Kec. Tandukalua, Kab. Mamasa
Penerima : Kepala Sekolah / Panitia
Nomor Kontak HP: 0853 4251 6870

Pada Kegiatan Kegiatan Pemberian Kudapan Pangan Bergizi

Yang Menyerahkan
CV. Dian Satrio



Penerima,
Kepala Sekolah



Mengetahui
pejabat pembuat komitmen

Adnan, SP
NIP. 1979 0404 2006 041024

TANDA TERIMA PENYERAHAN MAKANAN KUDAPAN PANGAN BERGIZI

Telah diterima :

Item : Paket Makanan Kudapan (Rolade Ayam, Sate Telur Puyuh, dan Susu UHT 200 ml)

Jumlah : 147 Paket

Kelayakan dan Keamanan Pangan:

Indikator	Baik	Biasa	Kurang	Keterangan
Warna	✓			
Rasa	✓			
Aroma	✓			

Tanggal : 23 Oktober 2023

Tempat : SD 005 PAMBE, Desa Pambe, Kec. Tandukalua, Kab. Mamasa

Penerima : Kepala Sekolah / Panitia

Nomor Kontak HP: 0852 5507 8205

Pada Kegiatan Kegiatan Pemberian Kudapan Pangan Bergizi

Yang Menyerahkan
CV. Dian Sarinasti



Penerima,
Kepala Sekolah



SARI DEWI, S.Pd
2023/10/23

Mengetahui
pejabat pembuat komitmen

Adnan, SP

NIP: 19790909 2006041024

Nomor : 3435//PL.02.03/A/12/2023 29 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan
Pada Badan Pangan Nasional

Yth. terlampir
Di

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2700/PL.02.03/A.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Permohonan Persetujuan Hibah BMN dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa kudapan pada kegiatan GENIUS pada 10 Provinsi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp.12.336.998.890,- kepada Dinas Provinsi yang menangani Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan melakukan Hibah, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK/06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan Hibah ini, agar Saudara menetapkan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2. Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Kuasa Pengguna Barang Badan Pangan Nasional dan Para Kepala Dinas Provinsi yang menangani Pangan selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan.
3. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
5. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q KPKNL Jakarta II paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
6. Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

7. Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Pangan Nasional
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional



Sarwo Edhy
Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP 196203221983031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pangan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Badan Pangan Nasional;
3. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

LAMPIRAN DAFTAR SATKER & NILAI PEROLEHAN KEGIATAN GENIUS

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai
1	690704	DINAS PANGAN ACEH	1.230.000.000
2	690705	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	1.241.013.000
3	690706	DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.231.069.000
4	690709	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.250.000.000
5	690700	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	1.234.050.400
6	690703	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	1.250.000.000
7	690715	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	1.206.700.000
8	690717	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.250.000.000
9	690720	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	1.198.560.000
10	690731	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.245.606.490
			12.336.998.890



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

16 Mei 2024

Nomor : 154.1/TS.03.03/K/5/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian *Action Plan* atas Konsep LHP Tahun 2023

Yth.
Auditor Utama Keuangan Negara IV
Badan Pemeriksa Keuangan
di
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Auditor Utama Keuangan Negara IV Nomor 65B/S/XVII/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan Permintaan Rencana Aksi atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) – Dana CPP Tahun 2023 pada UAKPA BUN Badan Pangan Nasional, berikut kami sampaikan *action plan* atas Konsep LHP Tahun 2023.

Atas perhatian dan Kerjasama Bapak kami sampaikan terima kasih

Kepala Badan Pangan Nasional




Arief Prasetyo Adi

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN BELANJA LAIN-LAIN (BA 999.08) –
DANA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN 2023
PADA
UAKPA BUN BADAN PANGAN NASIONAL**

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
1	<p>Perencanaan dan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Berupa Beras dari CPP Tahun 2023 Belum Memadai</p> <p>a. Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Dilaksanakan Kegiatan Penganggaran Bapanas Belum Memiliki Perikatan / Perjanjian Kerja Sama dengan Perum BULOG Terkait Penyaluran Bantuan Pangan Berupa Beras</p> <p>c. Data KPM dari Kementerian Sosial Tidak Memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Verifikasi dan Validasi atas Data Penerima Bantuan Pangan Tidak Memadai</p> <p>e. Penggantian Penerima Bantuan Pangan Tidak Dilaksanakan dengan Tertib dan Terdapat PBP Pengganti Tanpa Didukung Dokumen SPTJM dan Pengganti BAST Pengganti Sebanyak 11.160 kg Sebesar Rp162.708.634,00</p> <p>f. Penyaluran Bantuan Pangan yang Dilaksanakan dengan Perwakilan Tidak Seluruhnya Dilengkapi Dokumen BAST</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar:</p> <p>a. Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan:</p> <p>1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/ kegiatan bantuan pangan, termasuk bantuan pangan berupa beras;</p> <p>2) Menyusun/menyempurnakan prosedur operasi standar (POS) kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan</p>	<p>a.1) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Biro OSH untuk menyusun/ menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/ kegiatan bantuan pangan, termasuk bantuan pangan berupa beras. Salah satunya dengan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang saat ini sedang dilakukan.</p> <p>a.2) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Biro OSH untuk menyusun/ menyempurnakan prosedur operasi standar (POS) kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan</p>	60 hari	<ol style="list-style-type: none"> Proses Bisnis mengacu kepada Peraturan Badan Pangan Nasional No 24 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional, merujuk pada NFA.01.01.CFM.04 Rilislah rapat pembahasan RPerpres 125/2022: <ul style="list-style-type: none"> Tgl 14 Mei 2024 Tgl 21 Mei 2024 Tgl 31 Mei 2024 Draft revisi Perpres 125/2022 POS Penyaluran Bantuan Pangan Surat permintaan clearance aplikasi SI penyaluran CPP ke Kemenkominfo, dan Bappenas. Progress clearance aplikasi melalui layanan aplikasi evaluasi anggaran (Layanan EGA)

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
g.	Perwakilan Sebanyak 83.980 kg Sebesar Rp1.042.975.912,00 Pengendalian atas Proses Penyaluran Bantuan Pangan kepada PBP Belum Memadai	<p>untuk kegiatan penugasan Bantuan Pangan;</p> <p>3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan bantuan pangan beras yang didasarkan pada <i>database</i> yang relevan;</p> <p>4) Menyusun/menyempurnakan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran;</p> <p>5) Menetapkan calon penerima bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan yang lebih terperinci dan ketentuan penyaluran secara kolektif/perwakilan yang dapat menjamin ketepatan penerima bantuan agar kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya;</p>	<p>untuk kegiatan penugasan Bantuan Pangan.</p> <p>a.3) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Kepala Pusdatin untuk menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan bantuan pangan beras yang didasarkan pada <i>database</i> yang relevan.</p> <p>a.4) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Biro PKH menyempurnakan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran.</p> <p>a.5) Bapanas telah menetapkan penerima bantuan pangan Tahun 2024 yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya. Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan yang lebih terperinci dan ketentuan penyaluran secara kolektif/perwakilan yang dapat menjamin ketepatan penerima bantuan agar kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana telah ditetapkan dalam petunjuk teknis.</p> <p>Bapanas saat ini sedang mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi bantuan pangan di Perum BULOG, ID Food, dan transporter termasuk penginputan data penerima</p>	<p>60 hari</p> <p>60 hari</p> <p>60 hari</p>	<p>7. Risalah rapat koordinasi dengan ID Food tanggal 28 Feb 2024 tentang system informasi bantuan pangan situngling</p> <p>8. Risalah rapat koordinasi dengan Perum BULOG dan transporter tanggal 19 Maret 2024 tentang sistem informasi bantuan pangan beras</p> <p>9. Risalah rapat koordinasi dengan perum BULOG, ID Food, dan transporter tanggal 5 Juni 2024 tentang identifikasi dokumen yang akan diintegrasikan ke aplikasi SI penyaluran CPP</p> <p>10. Draft rancangan SICPP</p> <p>11. POS Penganggaran (revisi) (Koordinasi dengan Biro PKH)</p> <p>12. SK Kepala Bapanas Nomor 189 Tahun 2024 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan POS Pengadaan Barang dan Jasa (Koordinasi dengan Biro KPU)</p> <p>13.</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		<p>6) Menyusun/menyempurnakan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan barang, distribusi, pertanggungjawaban dan pelaporan;</p>	<p>bantuan pangan dengan tujuan untuk pemantauan dan evaluasi.</p>	60 hari	
	<p>7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan yang mencakup KPA dan PPK dalam melakukan pengujian dokumen tagihan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; dan</p>	<p>a.6) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Biro KPU menyusun/ menyempurnakan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan</p>	<p>a.7.1) Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Kepala Pusdatin untuk menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan yang mencakup kewajiban KPA dan PPK dalam melakukan pengujian dokumen tagihan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2018</p> <p>a.7.2) Bapanas saat ini sedang mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi termasuk subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan yang mencakup kewajiban KPA dan PPK dalam melakukan pengujian dokumen tagihan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas</p>	60 hari	

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		<p>8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan yang mencakup data volume dan calon penerima dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerima secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Memerintahkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan termasuk pengaturan hak dan kewajiban antara Bapanas dan Perum BULOG;</p> <p>c. Memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam penyelesaian pembayaran bantuan pangan berupa beras kepada Perum BULOG sebesar Rp1.211.444.181,20; dan</p> <p>d. Memerintahkan <i>transporter</i> untuk melaksanakan ketentuan kontrak untuk melengkapi foto dan lokasi digital atas keseluruhan penyaluran bantuan pangan Tahap II.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>a.8) Bapanas telah menetapkan tim pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan dan akan memanfaatkan aplikasi SICPP yang sedang dikembangkan.</p> <p>b. Kepala Bapanas akan menerbitkan Surat Perintah kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan untuk lebih memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan selanjutnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban antara Bapanas dan Perum BULOG</p> <p>c. Kepala Bedan Pangan Nasional akan memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut dalam pembayaran bantuan pangan Tahap II 2023 setelah reviu dari BPKP atas penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut selesai dilaksanakan</p> <p>d. Kepala Bapanas akan memerintahkan Perum BULOG untuk melakukan pengendalian/pengawasan kepada <i>transporter</i> untuk melengkapi foto dan lokasi digital atas penyaluran bantuan pangan sesuai kontrak antara Perum BULOG dengan <i>transporter</i>.</p>	<p>60 hari</p> <p>40 hari</p> <p>60 hari</p> <p>30 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Revisi POK yang memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran</p> <p>2. Perjarjian Kerja Sama dengan Perum BULOG</p> <p>1. SPM dan SP2D beserta lampiran pembayaran bantuan pangan Tahap II 2023 yang sudah mengurangkan kelebihan pembayaran sesuai temuan BPK</p> <p>2. Hasil reviu BPKP</p> <p>1. Surat Kepala Bapanas kepada Perum BULOG</p>
2		BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar:			

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
	<p>Pengendalian Penyaluran Bantuan Pangan Berupa Beras Melalui Transporter Belum Memadai</p> <p>a. Penyusunan HPS dan RAB Kontrak Dilakukan Secara All in dan Perhitungannya pada 4 lot Pekerjaan yang Menggabungkan Beberapa Provinsi Berpotensi Merugikan Salah Satu Pihak</p> <p>b. Penyaluran Bantuan Pangan yang Dilaksanakan Secara Rapel Namun Pembayaran kepada Transporter Dibayarkan Secara Penuh</p> <p>c. Terdapat Pengalihan Kontrak Pekerjaan Utama oleh Transporter</p> <p>d. Bapanas dan Perum BULOG Tidak Memiliki Kendali atas Aplikasi Penyaluran Bantuan Pangan</p>	<p>a. Menyusun SOP yang mengatur kerja sama antara Bapanas, Perum Bulog dan Mitra Perum Bulog untuk menjamin pengendalian kegiatan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan mematuhi ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.</p> <p>b. Mengendalikan proses pengadaan jasa distribusi termasuk penyusunan HPS dan pemilihan transporter oleh Perum BULOG serta pelaksanaan dan pengalihan kontrak penyaluran bantuan pangan oleh transporter</p> <p>c. Memperhitungkan kelebihan pembayaran biaya distribusi Rp747.500.051,64;</p> <p>d. Dalam menyusun ketentuan kontrak supaya memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. Menyusun aplikasi penyaluran bantuan pangan di mana Bapanas memiliki kendali dalam pengendalian ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.</p>	<p>a. Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP untuk menyusun SOP kerja sama antara Bapanas, Perum Bulog dan Mitra Perum Bulog untuk menjamin pengendalian kegiatan penyaluran bantuan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan mematuhi ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku (Menyesuaikan peraturan terkait Perum BULOG</p> <p>b. Kepala Bapanas akan memerintahkan Direktur DCP dan Biro KPU untuk akan menyusun SOP proses pengadaan jasa distribusi termasuk penyusunan HPS dan pemilihan transporter oleh Perum BULOG serta pelaksanaan dan pengalihan kontrak penyaluran bantuan pangan oleh transporter</p> <p>c. Kepala Badan Pangan Nasional akan memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut dalam pembayaran bantuan pangan Tahap II 2023 setelah reviu dari BPKP atas penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut selesai dilaksanakan</p> <p>1. Kepala Bapanas akan memerintahkan kepada PPK agar dalam menyusun ketentuan kontrak supaya memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>e. Bapanas saat ini sedang mengembangkan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan Perum BULOG, ID Food, dan transporter termasuk pengendalian ketepatan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.</p>	<p>60 hari</p> <p>60 hari</p> <p>60 hari</p> <p>10 hari</p> <p>60 hari</p>	<p>1. SOP Kerja Sama antara Bapanas, Perum Bulog dan Mitra Perum Bulog</p> <p>2. SOP proses pengadaan jasa distribusi</p> <p>3. SK Tim kelebihan biaya pembayaran</p> <p>4. Surat permintaan clearnce aplikasi Si penyaluran CPP ke Kemenkominfo, dan Bappenas</p> <p>5. Progress clearance aplikasi melalui layanan aplikasi evaluasi anggaran (Layanan EGA)</p> <p>6. Risalah rapat koordinasi dengan ID Food tanggal 28 Feb 2024 tentang system informasi bantuan pangan stunting</p> <p>7. Risalah rapat koordinasi dengan Perum BULOG dan transporter tanggal 19 Maret 2024 tentang sistem informasi bantuan pangan beras</p> <p>8. Risalah rapat koordinasi dengan perum BULOG, ID Food, dan transporter tanggal 5 Juni 2024 tentang identifikasi dokumen yang akan diintegrasikan ke aplikasi Si penyaluran CPP</p> <p>9. Draft rancangan SICPP SPM dan SP2D beserta lampiran pembayaran bantuan pangan Tahap II 2023 yang sudah mengurangkan kelebihan pembayaran sesuai temuan BPK</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
3	<p>Kegiatan SPHP Beras Dilaksanakan Mendahului Penganggaran, dan Tidak Direncanakan serta Dikendalikan Secara Memadai</p> <p>a. Penyaluran SPHP Beras Tahun 2023 Mendahului Anggaran;</p> <p>b. Perencanaan SPHP Beras oleh Bapanas Belum Memadai;</p> <p>c. Pengendalian Penjualan SPHP Tidak Memadai;</p> <p>d. Kelebihan Pembayaran atas Penyaluran 461.730 kg SPHP Beras sebesar Rp1.024.337.835,90 yang Dijual di atas HET;</p> <p>Penyalahgunaan Beras SPHP Sebanyak 252 Ton Sebesar Rp799.049.160,00.</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar:</p> <p>a. Memerintahkan Direktur SPHP agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran SPHP Beras dan merencanakan detail pelaksanaan SPHP Beras secara memadai;</p> <p>b. Menyusun mekanisme perencanaan SPHP Beras termasuk pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Beras;</p> <p>c. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan SPHP Beras dalam teknis secara lebih terperinci, termasuk pembatasan pembelian di tingkat konsumen akhir, melalui distributor serta pemberian sanksi kepada mitra penyalur SPHP Beras yang tidak menaati ketentuan;</p>	<p>a. Kepala Bapanas akan menerbitkan Surat Perintah kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk lebih memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam melaksanakan kegiatan penyaluran SPHP Beras selanjutnya dan merencanakan detail pelaksanaan SPHP Beras secara memadai;</p> <p>a. Badan Pangan Nasional akan menyusun mekanisme perencanaan SPHP Beras termasuk pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Beras;</p> <p>b. Badan Pangan Nasional akan melakukan revisi terhadap Petunjuk Teknis SPHP Beras dengan mekanisme pengendalian pelaksanaan SPHP Beras dalam petunjuk teknis secara lebih terperinci, termasuk pembatasan pembelian di tingkat konsumen akhir, pelaporan dan pengendalian penyaluran melalui distributor. Sebagai bentuk pengendalian penyaluran beras SPHP, Bapanas telah memberikan sanksi berupa surat teguran kepada mitra penyalur</p>	<p>40 hari</p>	<p>11. Hasil reviu BPKP</p> <p>1. Surat Perintah Revisi POK yang memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran</p> <p>2. Dokumen perencanaan pelaksanaan SPHP Beras secara mendetail</p> <p>1. Proses Bisnis Penyaluran SPHP Beras merujuk mengacu kepada Peraturan Badan Pangan Nasional No 24 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional, merujuk pada NFA.01.01.CFM.04</p> <p>2. POS Penyaluran SPHP Beras</p> <p>3. Revisi Petunjuk Teknis SPHP Beras</p> <p>1. Proses Bisnis Penyaluran SPHP Beras</p> <p>2. POS Penyaluran SPHP Beras</p> <p>3. Revisi Petunjuk Teknis SPHP Beras</p> <p>4. Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 1213/TS.02.02/B/12/2023 tentang Teguran Atas Penjualan Beras SPHP</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		<p>d. Memerintahkan Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan;</p>	<p>SPHP Beras yang tidak menaati ketentuan;</p> <p>d.1 Kepala Bapanas akan menerbitkan surat perintah kepada Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Beras dan memanfaatkan aplikasi Panel Harga Pangan.</p> <p>d.2 Direktur SPHP akan menambah fitur dalam aplikasi panel harga terkait harga riil beras SPHP di lapangan</p> <p>d.3 Direktur SPHP akan menambah tugas enumerator terkait pemantauan harga beras SPHP</p>	40 hari	<p>1. Surat perintah Kepala Bapanas kepada Direktur SPHP untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPHP Beras</p> <p>2. Panduan aplikasi panel harga dan tangkapan layar harga riil beras SPHP</p> <p>3. SK enumerator yang sudah memuat pemantauan harga beras SPHP</p>
		<p>e. Meningkatkan alokasi SPHP Beras melalui saluran yang lebih terkendali di antaranya ritel modern, satgas operasi pasar, dan pemerintah daerah;</p>	<p>e. Kepala Bapanas akan mengugaskan BULOG untuk mengoptimalkan penyaluran SPHP Beras melalui saluran yang lebih terkendali di antaranya melalui ritel modern, satgas operasi pasar, dan pemerintah daerah;</p>	10 hari	<p>1. Surat Kepala Bapanas kepada Dirut BULOG untuk mengoptimalkan penyaluran SPHP Beras</p>
	<p>f. Menghentikan penyaluran beras CPP melalui skema komersial; dan</p>	<p>f.1. Penyaluran beras CPP melalui skema komersial telah berakhir 31 April 2024 atau sebelum panen raya tahun 2024 sebagaimana diatur pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Beras Premium Melalui Skema Komersial Tahun 2024</p> <p>f.2. Kepala Bapanas akan meminta perum BULOG untuk membuat laporan tentang pelaksanaan penyaluran beras CPP melalui skema komersial</p>	<p>f.1. Penyaluran beras CPP melalui skema komersial telah berakhir 31 April 2024 atau sebelum panen raya tahun 2024 sebagaimana diatur pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Beras Premium Melalui Skema Komersial Tahun 2024</p> <p>f.2. Kepala Bapanas akan meminta perum BULOG untuk membuat laporan tentang pelaksanaan penyaluran beras CPP melalui skema komersial</p>	40 hari	<p>1. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 21 tahun 2024 tentang Penambahan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Beras Premium Melalui Skema Komersial Tahun 2024</p> <p>2. Surat Kepala Bapanas kepada Perum BULOG perihal laporan pelaksanaan penyaluran beras CPP melalui skema komersial</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		g. Memperhitungkan kelebihan pembayaran atas SPHP Beras yang dijual di atas HET sebesar Rp1.024.337.835,90 dan penyalahgunaan SPHP Beras sebesar Rp799.049.160,00 atau total Rp1.823.386.995,90.	g. Kepala Badan Pangan Nasional akan memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut dalam pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023 setelah reviu dari BPKP atas penyaluran SPHP Beras tersebut selesai dilaksanakan	60 hari	3. Laporan Pelaksanaan Penyaluran Beras CPP melalui skema komersial 1. SPM dan SP2D beserta lampiran pembayaran SPHP Beras Triwulan IV 2023 yang sudah mengurangkan kelebihan pembayaran SPHP sesuai temuan BPK 2. Hasil reviu BPKP
4	Kegiatan SPHP Jagung Dilaksanakan Tanpa Penetapan Anggaran dan Tidak Tepat Sasaran	BPK merekomendasikan Kepala Bapanas agar:			
	a. Penyaluran SPHP Jagung Dilakukan Tanpa Penetapan Anggaran Terlebih dahulu; a. Perencanaan Alokasi SPHP Jagung Belum Sesuai dengan Fluktuasi Harga Jagung; b. Penetapan Peternak Usaha Menengah Besar Sebagai Sasaran SPHP Jagung Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; c. Penyaluran SPHP Jagung Masih Rendah dan Belum Terjadwal;	a. Memerintahkan Direktur SPHP agar memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam kegiatan penyaluran SPHP Jagung dan merencanakan secara rinci pelaksanaan SPHP Jagung secara memadai;	a. Kepala Bapanas akan menerbitkan Surat Perintah kepada Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan untuk memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dalam melaksanakan kegiatan penyaluran SPHP Jagung dan merencanakan secara rinci pelaksanaan SPHP Jagung secara memadai;	40 hari	1. Surat Perintah ; 2. Revisi POK yang memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran SPHP Jagung; 3. Dokumen perencanaan pelaksanaan SPHP Jagung secara terperinci.
	b. Memerintahkan Inspektorat Bapanas bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas pertanggungjawaban kegiatan SPHP Jagung TA 2023 dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran.	b. Memerintahkan Inspektorat Bapanas akan melaksanakan Inspeksi untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas pertanggungjawaban kegiatan SPHP Jagung TA 2023 dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran bekerja sama dengan BPKP	b. Kepala Bapanas akan memerintahkan Inspektur untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas pertanggungjawaban kegiatan SPHP Jagung TA 2023 dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran bekerja sama dengan BPKP	60 hari	1. Surat Kepala Bapanas kepada Inspektur 2. Laporan verifikasi dan validasi secara menyeluruh atas pertanggungjawaban kegiatan SPHP Jagung TA 2023
	c. Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup kegiatan:	1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan SPHP.	c.1 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro OSH untuk menyusun/menyempurnakan proses bisnis SPHP jagung yang memuat	60 hari	1. Proses Bisnis Penyaluran SPHP Jagung merujuk kepada

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		<p>termasuk SPHP Jagung yang mencakup pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Jagung;</p>	<p>tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan SPHP, termasuk SPHP Jagung yang mencakup pengalokasian target penyaluran, jumlah dan waktu penyaluran SPHP Jagung;</p>		<p>Peraturan Badan Pangan Nasional No 24 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional, merujuk pada NFA.01.01.CFM.04</p>
	<p>2) Menyusun/menyempurnakan SOP kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP jagung;</p>	<p>c.2 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro OSH untuk menyusun/menyempurnakan SOP kegiatan yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP jagung;</p>	<p>60 hari</p>	<p>2. POS Penyaluran SPHP Jagung 3. Revisi Petunjuk Teknis SPHP Jagung 4. Draft rancangan SICPP 5. Risalah rapat koordinasi dengan Kementerian untuk penyiapan data BNBA Peternak mandiri 6. POS Pengadaan Barang/Jasa 7. Laporan Monitoring dan Evaluasi SPHP Jagung</p>	
	<p>3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP jagung yang didasarkan pada database yang relevan;</p>	<p>c.3 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Pusdatin untuk menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP jagung yang didasarkan pada database yang relevan;</p>	<p>60 hari</p>		
	<p>4) Menyusun/menyempurnakan kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran;</p>	<p>c.4 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro PKH untuk menyusun/menyempurnakan POS kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran</p>	<p>60 hari</p>		
	<p>5) Menetapkan calon penerima SPHP jagung yang dirinci secara jelas BNBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta jumlah volume yang direncanakan agar kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra</p>	<p>c.5 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal penyempurnaan data BNBA Peternak mandiri serta mengembangkan mekanisme</p>	<p>60 hari</p>		

No	Judul Temuan	Rekomendasi yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
		<p>pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya;</p> <p>6) Menyusun/menyempurnakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan;</p>	<p>verifikasi dan validasi melalui sistem aplikasi.</p> <p>c.6 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Biro KPU untuk menyusun/menyempurnakan POS kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan;</p>	60 hari	
	7)	<p>Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan; dan</p>	<p>c.7 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP dan Kepala Pusdatin untuk menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan;</p>	60 hari	
	8)	<p>Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP jagung yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerima secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.</p>	<p>c.8 Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Direktur SPHP melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPHP Jagung secara efektif yang menggambarkan penjualan SPHP Jagung dan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerima secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.</p>	60 hari	

Jakarta, 16 Mei 2024
Kepala Badan Pangan Nasional



Arief Prasetyo Adi



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 154.2/KU.04.01/K/5/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rencana Aksi dan TLHP

16 Mei 2024

Yth.
Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI Nomor 660/S/XVII/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Badan Pangan Nasional serta Permintaan Rencana Aksi dan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bersama ini terlampir disampaikan Rencana Aksi dan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Badan Pangan Nasional,

Arief Prasetyo Adi, ST., MT
NIP 19741127022211004

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM KONSEP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023
PADA BADAN PANGAN NASIONAL DI JAKARTA

NO	Judul Temuan	Rekomendasi Yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLHP
1	2 Pendapatan Terdapat Keidaktepatan Pengakuan dan Pengungkapan PNPB Lainnya Sebesar Rp200.919.767,00	3 BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar menginstruksikan Kepala Biro Keuangan, Pengeadaan, dan Umum (Biro KPU) untuk berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian dalam rangka mengidentifikasi seluruh pendapatan yang merupakan hak masing-masing pihak.	4 Kepala Badan Pangan Nasional menginstruksikan Kepala Biro Keuangan Pengeadaan dan Umum untuk melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian dalam rangka mengidentifikasi seluruh pendapatan yang merupakan hak masing-masing pihak	5 60 hari	6 Surat Kepala Biro KPU nomor 1245/KU.01.01/A.3/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal. Tindaklanjut Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditujukan ke Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian
2	2.1 Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang sebesar Rp61.835.683.307,00 Belum Memadai	3 BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar: a. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap. b. Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PUM, LO dan Pelaksana Kegiatan yang tidak optimal dalam mengelola kas, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan, serta belum optimal dalam menerapkan pembukuan dan pertanggungjawaban c. Memerintahkan KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan kas yang dilakukan oleh Bendahara	4 Kepala Badan Pangan Nasional akan menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap a.2 Inspektur akan membentuk tim untuk melaksanakan reviu atas pertanggungjawaban belanja senilai Rp61.835.683.307,00 (Rp57.620.263.128,00 + Rp4.215.420.179,00) serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap b. Kepala Badan Pangan Nasional telah memberikan teguran Pengeluaran, PUM, LO dan Pelaksana Kegiatan yang tidak optimal dalam mengelola kas, menguji dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran kegiatan, serta belum optimal dalam menerapkan pembukuan dan pertanggungjawaban c. Kepala Badan telah memerintahkan KPA lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan kas yang dilakukan oleh Bendahara	5 Juli-Agustus 2024 60 hari 60 hari 60 hari	6 1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur 2. Surat Tugas Inspektur 3. Laporan Hasil Reviu atas Pertanggungjawaban Belanja senilai Rp61.835.683.307,00 b. Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 164/KU.04.01/K/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Surat Teguran kepada Pengelola Keuangan c. Surat Kepala Badan nomor 164/KU.04.01/K/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Surat Teguran kepada Pengelola Keuangan
2.2	Penggunaan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) dalam Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2023 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Minimal Sebesar Rp5.036.073.525,00	3 BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar: a. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja perjalanan Dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan	4 Kepala Badan Pangan Nasional akan menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas belanja perjalanan dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00 serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan. a.2 Inspektur akan membentuk tim reviu Belanja perjalanan Dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila pertanggungjawaban riil tidak disampaikan	5 Juli-Agustus 2024	6 1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur 2. Surat Tugas Inspektur 3. Laporan Hasil Reviu atas Belanja perjalanan Dinas minimal senilai Rp5.036.073.525,00

2.3	Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja BBM Belum Memadai	<p>b. Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas</p> <p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p> <p>a. Kepala Badan Pangan Nasional akan memberikan perintah kepada Inspektur untuk melakukan reviu pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00 serta menarik apabila pertanggungjawaban rili tidak disampaikan.</p>	<p>b. Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas</p> <p>a.1. Kepala Badan Pangan Nasional akan menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00 serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban rili tidak disampaikan.</p> <p>a.2. Inspektur akan membentuk tim untuk melaksanakan reviu atas pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00 serta menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban rili tidak disampaikan.</p>	60 hari	Juli-Agustus 2024	<p>b. Surat Kepala Badan nomor 164/KU.04.01/K/6/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Surat Teguran kepada Pengelola Keuangan</p> <p>1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur</p> <p>2. Surat Tugas Inspektur</p> <p>3. Laporan Hasil Reviu atas pertanggungjawaban Belanja BBM minimal sebesar Rp1.321.350.000,00 dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap sebesar Rp27.916.388,00</p>
2.4	Penganggaran dan Penyaluran atas Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Berupa Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I Tahun 2023 Tidak Sesuai Ketentuan	<p>b. Memberikan sanksi kepada masing-masing PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan pengguna kendaraan dinas yang tidak memedomani ketentuan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang.</p> <p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p> <p>a. Memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>b. Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup:</p> <p>1) Menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan bantuan pangan dan program/kegiatan SPHP, baik untuk beras, jagung, kedelai, daging dan telur dan cakupan penugasan yang lainnya.</p> <p>2) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOIP) yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP dan Bantuan Pangan.</p>	<p>a. Memedomani ketentuan pelaksanaan APBN dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>b. Melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai, yang antara lain mencakup:</p> <p>1) Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Ka Biro PKH, Ka Biro OSH, Dir SPHP, Dir DCP dan Inspektur untuk menyusun/menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis yang menyeluruh dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan mengenai program/kegiatan bantuan pangan dan program/kegiatan SPHP, baik untuk beras, jagung, kedelai, daging dan telur dan cakupan penugasan yang lainnya.</p> <p>2) Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Ka Biro PKH, Ka Biro OSH, Dir SPHP, Dir DCP dan Inspektur untuk menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOIP) yang memperhatikan pengendalian tata kelola atau proses bisnis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang mencakup rencana kebutuhan untuk kegiatan penugasan SPHP dan Bantuan Pangan.</p>	60 hari	60 hari	<p>a. Perikatan/kontrak antara PPK dan Pihak Bulog/BUMIN Pangan</p> <p>b. Substistem proses perencanaan dan pengendalian kegiatan bantuan pangan secara memadai:</p> <p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional</p> <p>2. Proses Bisnis Kegiatan Program/Kegiatan Bantuan Pangan dan SPHP</p> <p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional</p> <p>2. SOP Kegiatan Program/Kegiatan Bantuan Pangan dan SPHP</p>

<p>3) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP dan bantuan pangan yang didasarkan pada database yang relevan.</p>	<p>3) Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Ka Biro PKH, Dir SPHP, Dir DCP, Ka Pusdatin dan Inspektur untuk menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan perencanaan kebutuhan kegiatan SPHP dan bantuan pangan yang didasarkan pada database yang relevan.</p>	<p>60 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional 2. SOP Kegiatan Program/Kegiatan Bantuan Pangan dan SPHP 3. Aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah (SICPP)</p>
<p>4) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam kegiatan penganggaran.</p>	<p>4) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan penganggaran yang memperhatikan rencana kebutuhan, ketersediaan pagu anggaran, skala prioritas dan aspek lain dalam pagu anggaran</p>	<p>60 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional 2. SOP Kegiatan Penganggaran Bantuan Pangan</p>
<p>5) Menetapkan calon penerima SPHP yang dirinci sampai ke tingkat pengecer beserta jumlah volume serta bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem pemantauan dan evaluasinya.</p>	<p>5) Menetapkan calon penerima SPHP yang dirinci sampai ke tingkat pengecer beserta jumlah volume yang direncanakan serta bantuan pangan yang dirinci secara jelas BNBA beserta volumenya agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan oleh mitra pelaksana dan dapat diinput dalam sistem aplikasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasinya.</p>		<p>5) Surat Penetapan Kepala Bapanas tentang: a. penetapan wilayah, jumlah, waktu, dan sasaran penyaluran beras SPHP. b. penetapan BNBA penerima CJP berdasarkan KEPMENTAN (Keputusan Menteri Pertanian) tentang peternak mandiri penerima CJP. c. penetapan jumlah BNBA penerima, jenis dan waktu penyaluran bantuan pangan. d. Laporan Pembahasan Penetapan Sasaran Penerima SPHP dan Bantuan Pangan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK.</p>
<p>6) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan.</p>	<p>6) Menyusun/menyempurnakan prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan.</p>		<p>6) a. Surat Tugas dari Ka Badan Pangan Nasional kepada Kepala Biro KPU, Pusdatin, Dir DCP, Dir SPHP, Inspektur, Biro OSH. Untuk menyusun SOP pengadaan barang/jasa yang menjadi penugasan. b. prosedur kegiatan standar (SOP) kegiatan pengadaan barang/jasa yang berlaku mulai dari proses pemilihan pengadaan barang, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan.</p>
<p>7) Menyusun/menyempurnakan subsistem aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan.</p>	<p>7) Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Dir SPHP, Dir DCP, Ka Pusdatin dan Inspektur untuk menyusun/menyempurnakan aplikasi untuk kegiatan pengadaan, pendistribusian, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan penugasan</p>	<p>60 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional kepada Kepala Pusdatin, Dir SPHP, Dir DCP, dan Inspektur untuk menyempurnakan aplikasi. Aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah (SICPP)</p>
<p>8) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerima secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan</p>	<p>8) Kepala Badan Pangan Nasional akan memerintahkan Dir SPHP, Dir DCP, Ka Pusdatin dan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan SPHP dan Bantuan Pangan yang mencakup data volume penjualan dan harga jual per wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi yang terintegrasi yang menggambarkan kegiatan penyaluran dan para penerima secara jelas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan</p>	<p>60 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional kepada Kepala Pusdatin, Dir SPHP, Dir DCP, dan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan pemantauan evaluasi melalui aplikasi SICPP. 2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi</p>
<p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p>			
<p>2.5 Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat Belum Memadai</p>			

	<p>a. Menyusun dan menerbitkan peraturan yang mengatur mekanisme untuk mengintegrasikan seluruh data banpem sejak tahap perencanaan, pelaksanaan penyuluran, pertanggungjawaban kegiatan, sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja program terkait serta BAST Banpem yang belum dipergunakan secara optimal sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.</p> <p>b. Memberikan sanksi kepada PPK kegiatan terkait yang belum tertib dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dapat dihindari melalui suatu aplikasi yang terintegrasi serta kurang cermat dalam proses pemilihan penyedia, dalam menetapkan penerima bantuan, mendokumentasikan SK Penetapan Penerima Banpem dan dalam menguji dokumen penagihan yang ditagihkan penyedia.</p>	<p>60 hari</p>	<p>1. Surat Perintah Ka Badan Pangan Nasional kepada Kepala Biro PKH, Ka Biro OSH, Ka Biro KPU, Dir SPHP, Dir DCP, Ka Pusdatin dan Inspektur untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan, pengadaan, dan penyuluran Banpem (BAST)</p> <p>2. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional</p>
<p>2.6 Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Penyusunan Database pada Kegiatan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Inspekturat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban Belanja Barang yang belum dapat diidentifikasi realisasi pelaksanaannya sebesar Rp1.952.000.000,00 serta menarik dan menyetorkan ke kas negara apabila dari hasil reviu pertanggungjawaban tidak valid</p> <p>b. Memberikan sanksi kepada PPK yang tidak optimal dalam menyusun perencanaan kegiatan swakelola, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA, serta menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada KPA.</p>	<p>Juli-Agustus 2024</p>	<p>1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur</p> <p>2. Surat Tugas Inspektur</p> <p>3. Laporan Hasil Reviu atas pertanggungjawaban Belanja Barang yang belum dapat diidentifikasi realisasi pelaksanaannya sebesar Rp1.952.000.000,00</p> <p>4. Tanggapan hasil temuan KHP BPK tanggal 24 April 2024</p>
<p>2.7 Kesalahan Penganggaran dan Pembebanan Belanja Modal Sebesar Rp1.962.000.000,00</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p> <p>a. Memerintahkan Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>60 hari</p>	<p>Surat Kepala Badan Ke Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas hal penyusunan anggaran</p>
<p>2.8 Kesalahan Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Sebesar Rp2.909.306.332,00</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional agar:</p> <p>a. Memerintahkan Tim Penyusun Anggaran Kegiatan supaya dalam melakukan penyusunan anggaran dan verifikasi penyusunan anggaran berikutnya memperhatikan klasifikasi MAK sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>60 hari</p>	<p>a. Surat Kepala Badan Ke Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas hal penyusunan anggaran</p>

	<p>b. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat dan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan untuk memastikan telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan serah terima bantuan sebagai tanda terima bantuan.</p>	<p>b.1. Menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat dan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan untuk memastikan telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan serah terima bantuan dan bukti tanda tangan sebagai tanda terima bantuan.</p> <p>b.2. Inspektur akan membentuk tim untuk melaksanakan reviu Pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat dan Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan untuk memastikan telah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pelaksanaan serah terima bantuan dan bukti tanda tangan sebagai tanda terima bantuan.</p>	60 hari	<p>1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur</p> <p>2. Surat Tugas Inspektur</p> <p>3. Laporan Hasil Reviu atas pertanggungjawaban kegiatan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat</p>
<p>3</p> <p>3.1</p> <p>Kas</p> <p>Pengelolaan Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menginventarisir dan rekonsiliasi rekening-rekening pemerintah yang dikelola oleh Bapanas</p> <p>b. Menginstruksikan Inspektorat untuk mereviu pembayaran honor enumerator sebesar Rp8.336.960.000,00 yang diterima masing-masing enumerator secara tepat waktu dan tepat jumlah.</p>	<p>a. Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menginventarisir dan rekonsiliasi rekening-rekening pemerintah yang dikelola oleh Bapanas</p> <p>b.1. Menginstruksikan kepada Inspektur untuk melakukan reviu atas pembayaran honor enumerator sebesar Rp8.336.960.000,00 yang diterima masing-masing enumerator secara tepat waktu dan tepat jumlah.</p> <p>b.2. Inspektur akan membentuk tim untuk melaksanakan reviu pembayaran honor enumerator sebesar Rp8.336.960.000,00 yang diterima masing-masing enumerator secara tepat waktu dan tepat jumlah.</p>	60 hari	<p>a. Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Saiker Lingkup K/L antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Badan Pangan Nasional nomor BAR-355/PB.3.5/2024 tanggal 15 Mei 2024</p> <p>1. Surat Perintah Kepala Badan Pangan Nasional kepada Inspektur</p> <p>2. Surat Tugas Inspektur</p> <p>3. Laporan Hasil Reviu atas pembayaran honor enumerator sebesar Rp8.336.960.000,00</p>
<p>3.2</p> <p>Pengelolaan dan Pencatatan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran Belum Tertib</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapanas agar:</p> <p>a. Menginstruksikan PPK untuk melaporkan seluruh pemungutan dan penyeteroran pajak kepada Bendahara supaya transaksi pemungutan dan penyeteroran pajak tercatat pada aplikasi SAKTI</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk memastikan bahwa setoran pajak sebesar Rp423.333.549,00 telah disetorkan ke kas negara, dan menyeterorkan ke kas negara apabila dari hasil konfirmasi KPPN tidak ada penyeteroran pajak</p> <p>c. Memerintahkan PPK untuk menyeterorkan pajak yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.856.000,00;</p> <p>d. Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyeteroran pajak.</p>	<p>a. Menginstruksikan PPK untuk melaporkan seluruh pemungutan dan penyeteroran pajak kepada Bendahara supaya transaksi pemungutan dan penyeteroran pajak tercatat pada aplikasi SAKTI</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Biro KPU supaya melakukan rekonsiliasi dengan KPPN untuk memastikan bahwa setoran pajak sebesar Rp423.333.549,00 telah disetorkan ke kas negara, dan menyeterorkan ke kas negara apabila dari hasil konfirmasi KPPN tidak ada penyeteroran pajak</p> <p>c. Memerintahkan PPK untuk menyeterorkan pajak yang sudah dipungut namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp2.856.000,00;</p> <p>d. Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyeteroran pajak.</p>	60 hari	<p>a. Surat Kepala Biro Keuangan Pengadaan dan Umum ke PPK hal Pelaporan Suluruh Pungutan dan Penyeteroran Pajak kepada Bendahara</p> <p>b. Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyeteroran Pajak antara Biro KPU dengan KPPN Jakarta V</p> <p>c. bukti setor pajak</p> <p>d. Surat Teguran</p>

NO	Judul Temuan	Rekomendasi Yang Diusulkan	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan Dokumen Pendukung TLLHP
1	2	3	4	5	6
	d. Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyerahan pajak.	d. Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyerahan pajak.	d. Memberikan sanksi kepada PPK dan Bendahara pengeluaran yang tidak tertib dalam melakukan pencatatan atas pemungutan dan penyerahan pajak.	60 hari	d. Surat Teguran
4	Persediaan				
4.1	Penatausahaan dan Pengendalian Persediaan Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapenas agar: a. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Persediaan b. Menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan penatausahaan Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan.	a. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Persediaan b. Menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan penatausahaan Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan.	60 hari	a. Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kuasa Pengguna Barang perihal Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Persediaan b. Surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Pengurus Barang untuk melakukan penatausahaan Persediaan termasuk pencatatan mutasi barang dan opname Persediaan per periode pelaporan.
5	Aset Tetap				
5.1	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapenas agar: a. Menginstruksikan Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk menertibkan pengelolaan BMN terutama terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendaliannya, antara lain dengan : 1) Memberi label BMN dalam rangka pengamanan BMN. 2) Melaksanakan pencatatan aset sesuai ketentuan 3) Menetapkan status pemanfaatan barang dan perjanjian pemanfaatan barang dengan pihak lain 4) Menginventarisasi aset yang disewakan atau pinjam pakai dan memproses pengenaan PNPB sesuai ketentuan	a. Menginstruksikan Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk menertibkan pengelolaan BMN terutama terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendaliannya, antara lain dengan : 1) Memberi label BMN dalam rangka pengamanan BMN. 2) Melaksanakan pencatatan aset sesuai ketentuan 3) Menetapkan status pemanfaatan barang dan perjanjian pemanfaatan barang dengan pihak lain 4) Menginventarisasi aset yang disewakan atau pinjam pakai dan memproses pengenaan PNPB sesuai ketentuan	60 hari	a. Surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk menertibkan pengelolaan BMN 1) Label BMN 2) Daftar Barang Ruang 3) a. Draft SK penetapan pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan b. Surat Sesiama terkait status penelapan pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KM.5/KNL.0702/2024 tanggal 13 Mei 2024 d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KM.5/KNL.0702/2024 tanggal 27 Feb 2024 4) Daftar Inventarisasi Barang
	b. Memberikan sanksi kepada Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya	b. Memberikan sanksi kepada Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya	b. Memberikan sanksi kepada Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang yang belum optimal melakukan pengelolaan atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya	60 hari	b. Surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang untuk menertibkan pengelolaan BMN

Jakarta, 16 Mei 2024
Kepala Badan Pangan Nasional



Paraf

No

Jabatan

1, Sekretaris Utama

2, Inspektur

Arief Prasetyo Adi, ST., MT